



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak melalui Komisi-Komisi dengan hasil berupa rekomendasi/catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/1/KOM.A/DPRD/2026 tanggal 19 April 2026, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
 2. Laporan Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/1/KOM.B/DPRD/2026 tanggal 19 April 2026, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
 3. Laporan Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/1/KOM.C/DPRD/2026 tanggal 19 April 2026, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
 4. Laporan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/1/KOM.D/DPRD/2026 tanggal 19 April 2026, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
 5. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/4/R.KONSULTASI/DPRD/2026 tanggal 21 April 2026 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memperhatikan dan melaksanakan Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 April 2026



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**BUPATI DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Jalan Sultan Trenggono Nomor 45, Demak, Jawa Tengah 59571

(0291) 681480
Pos-el dprd.demakkab@gmail.com

REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS

DPRD

KABUPATEN DEMAK

**TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

(LKPJ)

BUPATI DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2025.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 45, Demak, Jawa Tengah 59571
Telepon (0291) 685577, Faksimile (0291) 681480
Laman dprd.demakkab.go.id, Pos-el dprd.demakkab@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah di atasnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Bupati Demak selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 beserta laporan realisasi anggarannya. Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2025. Selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk mem bahas nya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Sesuai regulasi yang mengaturnya, perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ meliputi:

1. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
2. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Pembentukan/perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah

Sebagai Laporan kinerja tahunan, LKPJ Kepala Daerah hakekatnya merupakan hasil dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi **ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan** kegiatan dan **kesadaran akan pentingnya keberhasilan** dalam mencapai target kinerjanya, serta **optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan** seluruh kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung

jawab bersama seluruh OPD di bawah koordinasi Kepala Daerah dan dalam pengawasan DPRD.

Berdasarkan PERUBAHAN RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 ditetapkan tema Pembangunan: **“Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”**. Sejuahmana keberhasilannya tentu akan tercermin dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini. Untuk itu beberapa hal yang hendaknya menjadi pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya (menilai kinerja pemerintah daerah tahun 2025) antara lain :

1. Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Daerah hasil PEMILU serentak se Indonesia, hal ini berpengaruh pada perubahan arah dan kebijakan Pembangunan baik tujuan maupun sasaran berdasarkan RPD lama 2024–2026 ke RPJMD yang baru 2025 – 2029.
2. Di awal tahun 2025, ditetapkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah nyata Pemerintah pusat untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran mereka agar pengelolaannya lebih hemat, efektif dan efisien.

Menurut presiden Dengan penghematan yang signifikan (Pemotongan TKD), diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat. Artinya, Capaian kinerja 2025 sebagaimana yang tersaji dalam LKPJ menjadi bukti apakah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD cukup efektif atau gagal mencapai tujuan.

3. Dari sisi perencanaan jangka menengah Pembangunan, LKPJ Tahun Anggaran 2025 juga menjadi pembuktian:
 - yang pertama apakah rumusan Permasalahan dan isu strategis 2025 memang relevan/sesuai kondisi sebenarnya sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD yang baru 2025 – 2029,
 - yang kedua apakah program unggulan Kepala Daerah efektif sebagai program terobosan (mampu mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran yang di tetapkan dalam RPJMD).

Berikut catatan hasil analisis terbatas atas dokumen LKPJ Bupati Demak tahun 2025 untuk menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah daerah dalam tahun berjalan dan yang akan datang.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN:

B.1. VISI DAN MISI RPJMD TAHUN 2021 – 2026

Visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dengan Misi:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Tema Pembangunan RKPd Tahun 2025 adalah : **“Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”**

B.2. VISI DAN MISI RPJMD TAHUN 2025 – 2029

Visi : **“DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA”**

dengan Misi:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berakhlak

Misi 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Misi 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tema Pembangunan Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah :
“Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”

C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026

Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Demak Tahun 2025

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target RKPD 2025-P
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,80	85,9
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	87,50	88,48
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Angka	70,00	70,00
			Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3	3,12

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target RKPD 2025-P
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	80,00	82,600
Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,90	74,90
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,658	0,658
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,856	0,860
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Angka	0,746	0,753
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,14	92,14

			Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Gg CO2eq	1.380,00	1.380,00
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	72,60	60,05
			Indeks Risiko Bencana	Angka	96,74	90,76

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,85-5,32	4,85-5,32
		Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,20-5,78	4,20-5,78
			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,4	1,4
		Meningkatnya investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,52	5,52
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	17,50	17,50
			Tingkat Kemiskinan	%	11,01-10,39	11,64-10,39
		Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,30-4,40	5,30-4,40
		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,264-0,292	0,264-0,292

BAB II TELAHAH TERHADAP LKPJ BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk pendanaan pembangunan tahun 2025 telah dirumuskan kebijakan keuangan daerah guna membiayai kegiatan mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran daerah tahun 2025. ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan disepakati bersama dengan DPRD dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 serta Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Target pendapatan dan alokasi belanja serta besaran defisit tahun 2025 yang ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Ringkasan Target APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Demak

Uraian	Target 2025
Pendapatan Daerah	2.610.961.447.170
Belanja Daerah	2.782.179.122.141
Surplus/Defisit	(171.217.674.971)
Pembiayaan Netto	171.217.674.971,34
Sisa tahun berjalan	-

Seharusnya perubahan penjabaran diuraikan data dan alasan/regulasi yang mendasarinya pada bab II LKPJ, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. namun dalam Bab II LKPJ Demak 2025 berisi tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas Amanah yang diembannya Bupati Demak telah melaporkan hasil kerja tahun 2025 dalam dokumen LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2025, meliputi indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

B.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

MISI	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	STATUS	CATATAN/ BAHAN REKOMENDASI DPRD
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,99	n/a	#VALUE!	Belum bisa diukur	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data pengukuran akhir tahun untuk evaluasi kinerja reformasi birokrasi.
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan	2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,44	75,08	99,55	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi Demak (75,08) lebih tinggi dari IPM Provinsi Jateng (74,77). Meskipun belum mencapai target, posisinya di atas rata-rata

Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	dan Berdaya Saing							provinsi. Rekomendasi: Fokus pada komponen penyusun IPM yang rendah (Pendidikan).
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Gg CO ₂ eq	1.354,64	1497,07	91,52	Tidak tercapai	Catatan: Emisi meningkat dan melampaui target. Rekomendasi: Implementasikan kebijakan rendah karbon, dorong energi terbarukan, dan perkuat sistem monitoring emisi.
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,36-5,32	6,99	144,12	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan ekonomi Demak (6,99%) jauh di atas Provinsi Jateng (5,37%). Rekomendasi: Identifikasi sektor unggulan pendorong pertumbuhan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	9,62-11,76	10,87	106,62	Tercapai	Catatan: Angka kemiskinan Demak (10,87%) masih lebih tinggi dari Provinsi Jateng (9,39%). Rekomendasi: Perkuat program pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial.
--	---	-----------------------	---	------------	-------	--------	----------	---

MISI/ TUJUAN	BELUM BISA DIUKUR	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	JUMLAH	% TERCAPAI
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	1			1	0%
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1			1	0%
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2	2	0%
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2	2	0%

Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran		2		2	100%
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		2		2	100%
Jumlah/Persen	1	2	2	5	40%
Persen	20%	40%	40%	100%	

MISI	SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (RKPD-P)	REALISASI 2025	%	STATUS	CATATAN
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	88,48	88,6	89,11	100,58	Tercapai	Catatan: Realisasi Demak (89,11) menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik, melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelayanan secara konsisten.
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Angka	69,1	69,2	72,19	104,32	Tercapai	Catatan: Peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, realisasi melampaui target. Rekomendasi: Evaluasi faktor-faktor keberhasilan untuk dipertahankan dan direplikasi.
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,09	3,12	3,17	101,6	Tercapai	Catatan: Persepsi anti-korupsi meningkat dan mencapai target. Rekomendasi: Perkuat program

Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya									transparansi dan akuntabilitas publik.
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,526	82,6	74,054	89,65	Tidak tercapai	Catatan: Penurunan drastis dari 2024 ke 2025. Rekomendasi: Evaluasi penyebab penurunan (serapan anggaran, kualitas belanja, kepatuhan pelaporan) dan lakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan.
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,647	0,667	0,648	97,11	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (0,648) di atas rata-rata provinsi (0,648 vs 0,648? data provinsi tidak tersisa). Perlu data pembandingan. Rekomendasi: Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan, kurangi angka putus sekolah, tingkatkan harapan lama sekolah.

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,858	0,86	0,863	100,32	Tercapai	Catatan: Realisasi Demak (0,863) lebih tinggi dari IP Kesehatan Provinsi Jateng (0,857). Rekomendasi : Pertahankan program kesehatan yang telah berhasil.
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Angka	0,746	0,748	0,757	101,26	Tercapai	Catatan: Daya beli masyarakat meningkat, realisasi (0,757) di atas target. Rekomendasi: Jaga stabilitas harga dan tingkatkan program pengendalian inflasi daerah.
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	n/a	92,14	n/a	#####	Belum bisa diukur	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi : Data IPG Provinsi Jateng 2024 sebesar 93,44. Segera lengkapi data untuk mengukur kesenjangan pembangunan gender.

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	IKLH	Angka	66,68	72,6	67,95	93,6	Tidak tercapai	Catatan: Kualitas lingkungan hidup stagnan, gagal mencapai target. Rekomendasi: Perkuat pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampel. Data IKLH Jateng 2025 tidak tersedia untuk pembandingan.
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,76	90,76	86	105,24	Tercapai	Catatan: Penurunan indeks risiko (semakin rendah semakin baik) menunjukkan keberhasilan mitigasi bencana. Rekomendasi: Tingkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat.
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan	1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	LPE kategori Industri Pengolahan	%	n/a	4,20-5,78	6,92	164,76	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan industri pengolahan Demak (6,92%) sangat tinggi dibanding provinsi (4,06%). Rekomendasi: Pertahankan iklim investasi dan dukung pengembangan sektor manufaktur.

dan Pengangguran									
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi local	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	n/a	1,4	9,53	680,71	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan sektor pertanian Demak (9,53%) spektakuler dibanding provinsi (4,78%). Rekomendasi: Analisis penyebab lonjakan (panen raya, kebijakan baru, dll) untuk keberlanjutan.
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	2. Meningkatnya investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	n/a	7,11	7,92	111,39	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan investasi Demak (7,92%) melampaui target dan di atas provinsi (7,92% vs 6,76%). Rekomendasi : Tingkatkan kemudahan berusaha dan promosi investasi.

Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	8,96	17,5	17,93	102,46	Tercapai	Catatan: Peningkatan PAD pariwisata berhasil mencapai target, menandakan pemulihan sektor pariwisata. Rekomendasi: Kembangkan destinasi dan event wisata unggulan.
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	4. Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,40-5,30	4,58	113,58	Tercapai	Catatan: TPT Demak (4,58%) sebanding dengan provinsi (4,66%). Berhasil ditekan dalam rentang target. Rekomendasi: Perluas pelatihan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka	5. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,31	10,39- 11,64	10,87	106,62	Tercapai	Catatan: KESALAHAN DATA - Target (10,39-11,64) sangat tidak masuk akal untuk Indeks Gini (rentang 0-1). Angka ini kemungkinan

Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran							adalah target kemiskinan yang tertukar. Rekomendasi : Perbaiki input target Indeks Gini. Realisasi ketimpangan Demak (0,31) relatif baik.
--	--	--	--	--	--	--	---

MISI/SASARAN	BELUM BISA DIUKUR	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	JUMLAH	% TERCAPAI
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya		3	1	4	75%
1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah		1		1	100%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		2	1	3	67%
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	3	2	6	50%
1. Meningkatnya kualitas pendidikan			1	1	0%
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		1		1	100%
3. Meningkatnya pendapatan Masyarakat		1		1	100%

4. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	1			1	0%
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana		1	1	2	50%
Misi 3: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran		6		6	100%
1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi local		2		2	100%
2. Meningkatnya investasi daerah		1		1	100%
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata		1		1	100%
4. Menurunnya jumlah pengangguran		1		1	100%
5. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi Masyarakat		1		1	100%
Jumlah/Persen	1	12	3	16	75%
Persen	6%	75%	19%	100%	

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025 (RKPD-P)	REALISASI 2025	%	STATUS	CATATAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85,9	87	n/a	#VALUE!	Belum bisa diukur	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data pengukuran akhir tahun untuk evaluasi kinerja reformasi birokrasi.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	88,48	88,6	89,11	100,58	Tercapai	Catatan: Realisasi Demak (89,11) menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik, melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelayanan secara konsisten.
3	Nilai SAKIP Daerah	Angka	69,1	69,2	72,19	104,32	Tercapai	Catatan: Peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, realisasi melampaui target. Rekomendasi: Evaluasi faktor-faktor keberhasilan untuk dipertahankan dan direplikasi.
4	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,09	3,12	3,17	101,6	Tercapai	Catatan: Persepsi anti-korupsi meningkat dan mencapai target. Rekomendasi: Perkuat program transparansi dan akuntabilitas publik.
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,526	82,6	74,054	89,65	Tidak tercapai	Catatan: Penurunan drastis dari 2024 ke 2025. Rekomendasi: Evaluasi penyebab penurunan (serapan anggaran, kualitas belanja, kepatuhan pelaporan) dan lakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan.

6	IPM	Angka	74,57	75,42	75,08	99,55	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi Demak (75,08) lebih tinggi dari IPM Provinsi Jateng (74,77). Meskipun belum mencapai target, posisinya di atas rata-rata provinsi. Rekomendasi: Fokus pada komponen penyusun IPM yang rendah (Pendidikan).
7	Indeks Pendidikan	Angka	0,647	0,667	0,648	97,11	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (0,648) di atas rata-rata provinsi (0,648 vs 0,648? data provinsi tidak tersisa). Perlu data pembandingan. Rekomendasi: Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan, kurangi angka putus sekolah, tingkatkan harapan lama sekolah.
8	Indeks Kesehatan	Angka	0,858	0,86	0,863	100,32	Tercapai	Catatan: Realisasi Demak (0,863) lebih tinggi dari IP Kesehatan Provinsi Jateng (0,857). Rekomendasi: Pertahankan program kesehatan yang telah berhasil.
9	Indeks Pengeluaran	Angka	0,746	0,748	0,757	101,26	Tercapai	Catatan: Daya beli masyarakat meningkat, realisasi (0,757) di atas target. Rekomendasi: Jaga stabilitas harga dan tingkatkan program pengendalian inflasi daerah.
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	n/a	92,14	n/a	#VALUE!	Belum bisa diukur	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Data IPG Provinsi Jateng 2024 sebesar 93,44. Segera lengkapi data untuk mengukur kesenjangan pembangunan gender.

11	Emisi GRK	Gg CO2eq	1470,37	1380	1497,07	91,52	Tidak tercapai	Catatan: Emisi meningkat dan melampaui target. Rekomendasi: Implementasikan kebijakan rendah karbon, dorong energi terbarukan, dan perkuat sistem monitoring emisi.
12	IKLH	Angka	66,68	72,6	67,95	93,6	Tidak tercapai	Catatan: Kualitas lingkungan hidup stagnan, gagal mencapai target. Rekomendasi: Perkuat pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampel. Data IKLH Jateng 2025 tidak tersedia untuk pembandingan.
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,76	90,76	86	105,24	Tercapai	Catatan: Penurunan indeks risiko (semakin rendah semakin baik) menunjukkan keberhasilan mitigasi bencana. Rekomendasi: Tingkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat.
14	LPE	%	5,06	4,85-5,32	6,99	144,12	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan ekonomi Demak (6,99%) jauh di atas Provinsi Jateng (5,37%). Rekomendasi: Identifikasi sektor unggulan pendorong pertumbuhan untuk dikembangkan lebih lanjut.
15	LPE kategori Industri Pengolahan	%	n/a	4,20-5,78	6,92	164,76	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan industri pengolahan Demak (6,92%) sangat tinggi dibanding provinsi (4,06%). Rekomendasi: Pertahankan iklim investasi dan dukung pengembangan sektor manufaktur.

16	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	n/a	1,4	9,53	680,71	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan sektor pertanian Demak (9,53%) spektakuler dibanding provinsi (4,78%). Rekomendasi: Analisis penyebab lonjakan (panen raya, kebijakan baru, dll) untuk keberlanjutan.
17	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	n/a	7,11	7,92	111,39	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan investasi Demak (7,92%) melampaui target dan di atas provinsi (7,92% vs 6,76%). Rekomendasi: Tingkatkan kemudahan berusaha dan promosi investasi.
18	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	8,96	17,5	17,93	102,46	Tercapai	Catatan: Peningkatan PAD pariwisata berhasil mencapai target, menandakan pemulihan sektor pariwisata. Rekomendasi: Kembangkan destinasi dan event wisata unggulan.
19	Tingkat Kemiskinan	%	11,89	10,39-11,64	10,87	106,62	Tercapai	Catatan: Angka kemiskinan Demak (10,87%) masih lebih tinggi dari Provinsi Jateng (9,39%). Rekomendasi: Perkuat program pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial.
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,40-5,30	4,58	113,58	Tercapai	Catatan: TPT Demak (4,58%) sebanding dengan provinsi (4,66%). Berhasil ditekan dalam rentang target. Rekomendasi: Perluas pelatihan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

21	Indeks Gini	Angka	0,31	10,39-11,64	10,87	106,62	Tercapai	Catatan: KESALAHAN DATA - Target (10,39-11,64) sangat tidak masuk akal untuk Indeks Gini (rentang 0-1). Angka ini kemungkinan adalah target kemiskinan yang tertukar. Rekomendasi: Perbaiki input target Indeks Gini. Realisasi ketimpangan Demak (0,31) relatif baik.
----	-------------	-------	------	-------------	-------	--------	----------	--

IKU	Jumlah	%
Belum bisa diukur	2	10%
Tercapai	14	67%
Tidak tercapai	5	24%
Jumlah/Persen	21	100%

ASPEK	URUSAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPDP 2025	REALISASI 2025	%	STATUS	CATATAN
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	LPE	%	4,85-5,32	6,99	144,12	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan ekonomi Demak (6,99%) jauh di atas Provinsi Jateng (5,37%). Rekomendasi: Identifikasi sektor unggulan pendorong pertumbuhan untuk dikembangkan lebih lanjut.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,20-5,78	6,92	164,76	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan industri pengolahan Demak (6,92%) sangat tinggi dibanding provinsi (4,06%). Rekomendasi: Pertahankan iklim investasi dan dukung pengembangan sektor manufaktur.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,4	9,53	680,71	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan sektor pertanian Demak (9,53%) spektakuler dibanding provinsi (4,78%). Rekomendasi: Analisis penyebab lonjakan (panen raya, kebijakan baru, dll) untuk keberlanjutan.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	17,5	17,93	102,46	Tercapai	Catatan: Peningkatan PAD pariwisata berhasil mencapai target, menandakan pemulihan sektor pariwisata. Rekomendasi: Kembangkan destinasi dan event wisata unggulan.

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	PDRB per Kapita	(Rp.00 0.000)	29,58	30,65	103,62	Tercapai	Catatan: PDRB per kapita Demak (30,65 juta) menunjukkan peningkatan dan melampaui target. Rekomendasi: Jaga stabilitas ekonomi dan tingkatkan produktivitas.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Indeks Gini	Angka	0,264-0,292	0,277	105,14	Tercapai	Catatan: Ketimpangan pendapatan Demak (0,277) masuk dalam rentang target yang ditetapkan dan tergolong sedang. Rekomendasi: Perkuat program pro-rakyat dan pemerataan pembangunan.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Tingkat Kemiskinan	%	10,39-11,64	10,87	106,62	Tercapai	Catatan: Angka kemiskinan Demak (10,87%) masih lebih tinggi dari Provinsi Jateng (9,39%). Rekomendasi: Perkuat program pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	IPM	Angka	75,42	75,08	99,55	Tidak tercapai	Catatan: IPM Demak (75,08) lebih tinggi dari Provinsi Jateng (74,77) namun belum mencapai target. Rekomendasi: Fokus pada komponen penyusun IPM yang rendah (Pendidikan).
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	92,14	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. IPG Provinsi Jateng 2024 sebesar 93,44. Rekomendasi: Segera lengkapi data untuk mengukur kesenjangan pembangunan gender.

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Indeks Pendidikan	Angka	0,667	0,648	97,11	Tidak tercapai	Catatan: Hampir tercapai, masih kurang 0,019 poin. Rekomendasi: Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan, kurangi angka putus sekolah.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Indeks Kesehatan	Angka	0,86	0,863	100,32	Tercapai	Catatan: Indeks kesehatan Demak (0,863) lebih tinggi dari provinsi (0,857). Rekomendasi: Pertahankan program kesehatan yang telah berhasil.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Indeks Pengeluaran	Angka	0,748	0,757	101,26	Tercapai	Catatan: Daya beli masyarakat meningkat dan melampaui target. Rekomendasi: Jaga stabilitas harga dan tingkatkan program pengendalian inflasi daerah.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14	13,37	95,5	Tidak tercapai	Catatan: HLS Demak (13,37 tahun) masih di bawah target. Rekomendasi: Tingkatkan partisipasi pendidikan tinggi dan program kejar paket.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,34	8,29	99,4	Tidak tercapai	Catatan: RLS Demak (8,29 tahun) hampir tercapai namun masih kurang. Rekomendasi: Program percepatan wajib belajar 12 tahun dan penuntasan Wajar Dikdas.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,91	76,08	100,22	Tercapai	Catatan: AHH Demak (76,08 tahun) lebih tinggi dari provinsi (75,24 tahun). Rekomendasi: Pertahankan program kesehatan preventif dan promotif.

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	88,6	89,11	100,58	Tercapai	Catatan: IKM Demak (89,11) menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelayanan secara konsisten.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	95,39	95,42	100,03	Tercapai	Catatan: Penyerapan tenaga kerja sangat baik, hampir seluruh angkatan kerja terserap. Rekomendasi: Tingkatkan kualitas kerja dan perluasan kesempatan kerja.
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Lintas urusan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40-5,30	4,58	113,58	Tercapai	Catatan: TPT Demak (4,58%) sebanding dengan provinsi (4,66%). Berhasil ditekan dalam rentang target. Rekomendasi: Perluas pelatihan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	83,5	84,14	100,77	Tercapai	Catatan: Kualitas sekolah terus meningkat, melampaui target. Rekomendasi: Dorong akreditasi unggul (A) untuk sekolah-sekolah.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	7,25	6,73	107,14	Tercapai	Catatan: AKB Demak (6,73/1000 kelahiran) lebih rendah dari target, menandakan keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas layanan kesehatan maternal.

2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	63,5	38,11	139,99	Tercapai	Catatan: AKI Demak (38,11/100.000) sangat baik, jauh di bawah target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan untuk direplikasi di daerah lain.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh fasilitas kesehatan telah terakreditasi minimal Madya. Rekomendasi: Tingkatkan ke akreditasi Paripurna.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh desa telah mencapai status Siaga Aktif Mandiri. Rekomendasi: Pertahankan dan perkuat kapasitas desa siaga.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	96,75	97,81	101,1	Tercapai	Catatan: Akses air minum dan sanitasi layak lebih tinggi dari provinsi (95,73% untuk air minum). Rekomendasi: Pastikan keberlanjutan dan kualitas layanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	96,15	97,59	101,5	Tercapai	Catatan: Akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak sangat baik. Rekomendasi: Fokus pada daerah yang masih belum terlayani.

2. Aspek Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Angka	1,68	1,68	100	Tercapai	Catatan: Rasio kemantapan jalan tepat mencapai target. Rekomendasi: Tingkatkan kualitas pemeliharaan jalan secara berkala.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rasio jaringan irigasi	Angka	13,44	13,58	101,04	Tercapai	Catatan: Rasio jaringan irigasi melampaui target. Rekomendasi: Optimalisasi jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	94,72	87,846	92,74	Tidak tercapai	Catatan: Kondisi drainase masih di bawah target. Rekomendasi: Tingkatkan program rehabilitasi dan pemeliharaan drainase secara berkala.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perumahan Dan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	99,46	99,52	100,06	Tercapai	Catatan: Hampir seluruh kawasan permukiman telah layak huni. Rekomendasi: Fokus pada penanganan kawasan kumuh yang tersisa.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perumahan Dan Pemukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	51,78	57,51	111,07	Tercapai	Catatan: Penurunan kawasan kumuh melampaui target. Rekomendasi: Percepat penanganan kawasan kumuh yang tersisa.
2. Aspek Pelayanan Umum	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh Perda dan Perkada ditegakkan dengan baik. Rekomendasi: Pertahankan konsistensi penegakan hukum dan tingkatkan sosialisasi Perda kepada masyarakat.

2. Aspek Pelayanan Umum	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan. Rekomendasi: Tingkatkan sistem deteksi dini dan pencegahan potensi gangguan trantibum.
2. Aspek Pelayanan Umum	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	72,73	90,91	125	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan desa tangguh bencana melampaui target secara signifikan. Rekomendasi: Perluas program desa tangguh bencana ke seluruh wilayah.
2. Aspek Pelayanan Umum	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	45,24	50	110,52	Tercapai	Catatan: Capaian desa tangguh bencana (50%) melampaui target. Rekomendasi: Tingkatkan kapasitas dan fasilitasi desa tangguh bencana secara berkelanjutan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Sosial	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh korban bencana pulih fungsi sosialnya. Rekomendasi: Perkuat sistem pemulihan pasca-bencana yang responsif.
2. Aspek Pelayanan Umum	Sosial	Persentase PPKS yang mandiri	%	1,96	3,19	162,76	Tercapai	Catatan: Peningkatan kemandirian PPKS melampaui target. Rekomendasi: Perluas program pemberdayaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Aspek Pelayanan Umum	Sosial	Persentase Penurunan PPKS	%	9,38	9,82	104,69	Tercapai	Catatan: Penurunan jumlah PPKS melampaui

								target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan untuk direplikasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Tenaga Kerja	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh pelaku usaha menerapkan UMR. UMK Demak 2025 sebesar Rp2.698.305. Rekomendasi: Lakukan monitoring rutin kepatuhan UMK.
2. Aspek Pelayanan Umum	Tenaga Kerja	Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	%	92,65	95,22	102,77	Tercapai	Catatan: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melampaui target. Rekomendasi: Tingkatkan sosialisasi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	82,77	82,81	100,05	Tercapai	Catatan: Penempatan tenaga kerja tepat mencapai target. Rekomendasi: Perluas kerja sama dengan dunia usaha dan peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	68,79	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. IDG Provinsi Jateng 2024 sebesar 75,89. Rekomendasi: Segera lengkapi data untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan Dan	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	70,69	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk mengevaluasi kesejahteraan anak secara komprehensif.

	Perlindungan Anak							
2. Aspek Pelayanan Umum	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	701-800	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk mengevaluasi capaian Kabupaten Layak Anak.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	94,4	96,56	102,29	Tercapai	Catatan: Skor PPH melampaui target, menunjukkan keragaman konsumsi pangan yang baik. Rekomendasi: Tingkatkan edukasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
2. Aspek Pelayanan Umum	Pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	%	2,32	6,33	272,84	Tercapai	Catatan: Peningkatan ketersediaan pangan sangat tinggi, melampaui target. Rekomendasi: Pastikan keberlanjutan dan stabilitas ketersediaan pangan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pertanahan	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	100	63,33	63,33	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (63,33%) jauh di bawah target (100%). Rekomendasi: PRIORITAS TINGGI - Percepat program sertifikasi aset tanah Pemkab dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai.

2. Aspek Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,55	73,65	87,11	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (73,65) di bawah target, menurun dibanding target. Data Provinsi Jateng untuk IKLH dan komponennya tidak tersedia. Rekomendasi: Identifikasi sumber pencemaran udara (industri, transportasi, pembakaran terbuka) dan lakukan pengendalian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran udara	%	0,02	0,02	100	Tercapai	Catatan: Target penurunan pencemaran udara tepat tercapai, namun angkanya sangat kecil. Rekomendasi: Tingkatkan target penurunan pencemaran udara yang lebih ambisius.
2. Aspek Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	73,17	72,17	98,63	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (72,17) sedikit di bawah target (73,17). Rekomendasi: Perkuat pengawasan pencemaran air dari limbah domestik dan industri.
2. Aspek Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	%	0,02	0,02	100	Tercapai	Catatan: Target penurunan pencemaran air permukaan tepat tercapai, namun angkanya sangat kecil. Rekomendasi: Tingkatkan target penurunan pencemaran air yang lebih ambisius.
2. Aspek Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup	Indeks Tutupan Lahan	Angka	49,52	50,15	101,27	Tercapai	Catatan: Indeks tutupan lahan melampaui target, indikasi perbaikan kualitas tutupan lahan. Rekomendasi: Perkuat program rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Lingkungan Hidup	Rasio Luas Tutupan Lahan	Angka	21,97	22,25	101,27	Tercapai	Catatan: Rasio luas tutupan lahan meningkat dan melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan upaya konservasi lahan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Admuduk	Angka	90,6	90,63	100,03	Tercapai	Catatan: Kualitas pelayanan adminduk sangat baik, melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan inovasi pelayanan adminduk.
2. Aspek Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	98,8	98,44	99,64	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (98,44%) lebih tinggi dari provinsi (98,77% berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran), namun sedikit di bawah target. Rekomendasi: Lakukan jemput bola dan layanan keliling untuk menjangkau penduduk yang belum memiliki KTP elektronik.
2. Aspek Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	%	99,7	99,75	100,05	Tercapai	Catatan: Realisasi (99,75%) sangat baik dan lebih tinggi dari provinsi (98,77%). Rekomendasi: Pertahankan dan dorong kepemilikan akta catatan sipil secara universal.
2. Aspek Pelayanan Umum	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh instansi memanfaatkan data kependudukan. Rekomendasi: Perkuat pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Angka	65,22	85,19	130,62	Tercapai	Catatan: Peningkatan desa mandiri sangat signifikan, melampaui target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan percepatan status desa mandiri untuk direplikasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,03	2,02	100,54	Tercapai	Catatan: TFR Demak (2,02) berhasil ditekan melampaui target dan berada di bawah rata-rata nasional (2,1). Rekomendasi: Pertahankan program KB yang efektif.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Prevalensi peserta KB Aktif	Angka	73,77	78,83	106,86	Tercapai	Catatan: Capaian peserta KB aktif melampaui target. Data Provinsi Jateng untuk peserta KB aktif sebesar 65,48% dari total PUS. Rekomendasi: Tingkatkan akses dan kualitas pelayanan KB.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	Angka	93,2	93,8	100,64	Tercapai	Catatan: IKM transportasi melampaui target, menunjukkan kepuasan pengguna layanan transportasi yang baik. Rekomendasi: Pertahankan kualitas layanan dan tingkatkan keselamatan transportasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten	Angka	0,4	0,24	140	Tercapai	Catatan: Nilai kinerja lalu lintas (0,24) lebih baik dari target (semakin kecil semakin baik). Rekomendasi: Pertahankan manajemen lalu lintas yang efektif.

2. Aspek Pelayanan Umum	Komunikasi Dan Informatika	Indeks SPBE	Angka	3,98	4,09	102,76	Tercapai	Catatan: Indeks SPBE melampaui target, menunjukkan kemajuan implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Rekomendasi: Tingkatkan integrasi sistem dan layanan SPBE.
2. Aspek Pelayanan Umum	Komunikasi Dan Informatika	Indeks Layanan SPBE	Angka	4,55	4,51	99,12	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (4,51) sedikit di bawah target (4,55). Rekomendasi: Evaluasi dan tingkatkan kualitas layanan SPBE yang belum optimal.
2. Aspek Pelayanan Umum	Komunikasi Dan Informatika	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,85	4,1	106,49	Tercapai	Catatan: Tata kelola SPBE melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan perkuat kebijakan serta pengelolaan SPBE.
2. Aspek Pelayanan Umum	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	%	4,6	7,54	163,95	Tercapai	Catatan: Peningkatan skala usaha UMKM sangat signifikan, melampaui target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan untuk direplikasi dan perluasan program.
2. Aspek Pelayanan Umum	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	%	4,12	4,19	101,66	Tercapai	Catatan: Peningkatan koperasi berkualitas melampaui target. Rekomendasi: Perkuat pembinaan dan pengawasan koperasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Persentase Peningkatan Omset UKM	%	3,65	8,9	243,88	Tercapai	Catatan: Peningkatan omset UKM sangat tinggi, melampaui target secara signifikan. Rekomendasi: Analisis penyebab lonjakan omset untuk keberlanjutan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	91,4	91,41	100,01	Tercapai	Catatan: IKM perizinan penanaman modal sangat baik. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kemudahan perizinan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Penanaman Modal	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	hari	1	1	100	Tercapai	Catatan: Lama pengurusan perizinan tepat 1 hari. Rekomendasi: Pertahankan kecepatan pelayanan perizinan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Penanaman Modal	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	proyek	2550	2215	86,86	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi proyek investasi (2.215) di bawah target (2.550). Data PMDN & PMA Provinsi Jateng 2025: PMDN (90.004 proyek, Rp37,64T), PMA (15.074 proyek, Rp50,86T). Rekomendasi: PRIORITAS - Tingkatkan promosi investasi dan kemudahan berusaha.
2. Aspek Pelayanan Umum	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,24	0,08	33,33	Tidak tercapai	Catatan: Peningkatan investasi (0,08%) jauh di bawah target (0,24%). Rekomendasi: Evaluasi iklim investasi dan daya tarik daerah bagi investor.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepemudaan Dan Olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor	Angka	49	49,6	101,22	Tercapai	Catatan: Prestasi olahraga melampaui target. Perolehan medali PORPROV Jateng 2023: Demak meraih 60 medali (14 emas, 18 perak, 28 perunggu). Rekomendasi: Tingkatkan pembinaan atlet dan fasilitas olahraga.

		kejuaraan yang diikuti						
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,7	26,73	100,11	Tercapai	Catatan: Partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri tepat mencapai target. Rekomendasi: Perluas program wirausaha muda dan akses permodalan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepemudaan Dan Olahraga	Pertumbuhan wirausaha muda	%	17	17,1	100,59	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan wirausaha muda melampaui target. Rekomendasi: Perkuat inkubasi bisnis dan pendampingan wirausaha muda.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,5	30,52	100,07	Tercapai	Catatan: Partisipasi pemuda dalam organisasi tepat mencapai target. Rekomendasi: Fasilitasi ruang partisipasi pemuda yang lebih luas.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam	%	33,5	33,5	100	Tercapai	Catatan: Peningkatan partisipasi pemuda tepat mencapai target. Rekomendasi: Tingkatkan program pengembangan kepemudaan.

		organisasi kepemudaan						
2. Aspek Pelayanan Umum	Statistik	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh sistem data dan statistik terintegrasi dengan baik. Rekomendasi: Perkuat interoperabilitas data dan pemanfaatan satu data Indonesia.
2. Aspek Pelayanan Umum	Persandian	Indeks Keamanan Informasi	Angka	3	3	100	Tercapai	Catatan: Indeks keamanan informasi tepat mencapai target. Rekomendasi: Tingkatkan sistem keamanan informasi secara berkala.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kebudayaan	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	%	55,56	80	143,99	Tercapai	Catatan: Peningkatan pelestarian warisan budaya sangat signifikan, melampaui target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan untuk keberlanjutan program pelestarian budaya.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	75	9,42	12,56	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (9,42) jauh di bawah target (75). Data IPLM Provinsi Jateng 2025 sebesar 38,86. Rekomendasi: PRIORITAS TERTINGGI - Evaluasi total program literasi, tingkatkan akses dan promosi perpustakaan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	75,5	58,89	78	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (58,89) jauh di bawah target (75,5). Data Provinsi Jateng 2025 sebesar 57,11. Rekomendasi: PRIORITAS TERTINGGI - Gerakan gemar membaca massif, perbanyak taman baca masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	86	88,88	103,35	Tercapai	Catatan: Hasil pengawasan kearsipan melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kepatuhan pengelolaan arsip.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh Perangkat Daerah menerapkan arsip secara baku. Rekomendasi: Perkuat pengawasan dan pembinaan kearsipan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kelautan Dan Perikanan	LPE Subkategori Perikanan	%	5,67	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. LPE Perikanan Provinsi Jateng 2025 sebesar 5,28%. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi pertumbuhan sektor perikanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	8,8	8,9	101,14	Tercapai	Catatan: Peningkatan omset UKM perikanan melampaui target. Rekomendasi: Perluas akses pasar dan bantuan peralatan pengolahan ikan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kelautan Dan Perikanan	Total Produksi Perikanan	Ton	61035	61140	100,17	Tercapai	Catatan: Produksi perikanan melampaui target. Rekomendasi: Tingkatkan

		Tangkap dan Budidaya						budidaya perikanan yang berkelanjutan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pariwisata	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	92,14	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Data provinsi untuk indikator ini tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi kontribusi pariwisata terhadap PAD.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	41	41,02	100,05	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan kunjungan wisatawan melampaui target. Rekomendasi: Kembangkan destinasi dan event wisata unggulan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pertanian	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	1,4	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. LPE subkategori Provinsi Jateng 2025 sebesar 4,96%. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi pertumbuhan sektor pertanian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pertanian	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	%	4,19	-9,5	-226,73	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (-9,5%) negatif, menunjukkan penurunan produksi yang signifikan. Rekomendasi: PRIORITAS TERTINGGI - Evaluasi penyebab penurunan (gagal panen, hama, perubahan iklim, dll) dan lakukan intervensi cepat.

2. Aspek Pelayanan Umum	Perdagangan	Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali	%	96,75	96,77	100,02	Tercapai	Catatan: Stabilitas harga bahan pokok terjaga dengan baik, melampaui target. Tingkat inflasi Provinsi Jateng 2025 sebesar 2,72% (y-on-y). Rekomendasi: Perkuat operasi pasar dan sistem monitoring harga untuk mengendalikan inflasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	0,23	0,24	102,54	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan nilai ekspor melampaui target. Nilai ekspor Provinsi Jateng 2025 mencapai US\$12,62 miliar. Rekomendasi: Tingkatkan diversifikasi produk ekspor dan perluasan pasar.
2. Aspek Pelayanan Umum	Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	1,42	1,42	100	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan IKM tepat mencapai target. Jumlah industri di Provinsi Jateng 2025 tercatat 254.758 unit dengan 3,7 juta tenaga kerja. Rekomendasi: Perkuat pendampingan dan akses permodalan bagi IKM.
2. Aspek Pelayanan Umum	Industri	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	88	88,01	100,01	Tercapai	Catatan: Tingkat keaktifan IKM sangat baik, melampaui target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan untuk direplikasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK				Tidak tercapai	Catatan: Data realisasi dan target 2025 tidak tersedia. Provinsi Jateng tahun 2025 merealisasikan 73 KK transmigran. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi program transmigrasi.

2. Aspek Pelayanan Umum	Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	Angka	3,5096	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi capaian LPPD.
2. Aspek Pelayanan Umum	Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	75	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi capaian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	62	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi capaian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Sekretariat Dprd	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	86,4	86,46	100,07	Tercapai	Catatan: Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat sangat baik. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	88	88	100	Tercapai	Catatan: Indeks perencanaan pembangunan tepat mencapai target. Rekomendasi: Tingkatkan kualitas perencanaan partisipatif dan berbasis data.
2. Aspek Pelayanan Umum	Perencanaan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh rekomendasi monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti. Rekomendasi: Perkuat mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Keuangan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Tercapai	Catatan: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh. Rekomendasi: Pertahankan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Keuangan	Derajat Otonomi Fiskal	Angka	23	27,17	118,13	Tercapai	Catatan: Derajat otonomi fiskal melampaui target, menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang meningkat. PAD Provinsi Jateng 2025 sebesar Rp14,97 triliun. Rekomendasi: Tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Aspek Pelayanan Umum	Keuangan	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh tata kelola keuangan sesuai peraturan. Rekomendasi: Pertahankan kepatuhan dan tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh Perangkat Daerah mampu mengelola aset dengan baik. Rekomendasi: Perkuat sistem inventarisasi dan pemeliharaan aset.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepegawaian	Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian	Angka	90,6	90,63	100,03	Tercapai	Catatan: Kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian sangat baik. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas layanan kepegawaian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	83,1	83,17	100,08	Tercapai	Catatan: Profesionalitas ASN melampaui target. Jumlah ASN Provinsi Jateng 2025 sebanyak 482.869 orang. Rekomendasi: Tingkatkan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan Dan Pelatihan	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh jabatan ASN sesuai dengan kompetensi. Rekomendasi: Perkuat sistem rekrutmen dan penempatan berbasis kompetensi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Pendidikan Dan Pelatihan	Rasio pelanggaran disiplin ASN	Angka	0,77	0,66	114,29	Tercapai	Catatan: Rasio pelanggaran disiplin ASN (0,66) lebih baik dari target (semakin kecil semakin baik). Rekomendasi: Perkuat kode etik dan pengawasan disiplin ASN.

2. Aspek Pelayanan Umum	Penelitian Dan Pengembangan	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,39	54,89	97,34	Tidak tercapai	Catatan: Indeks inovasi daerah sedikit di bawah target. Rekomendasi: Tingkatkan budaya inovasi dan dukungan anggaran penelitian.
2. Aspek Pelayanan Umum	Penelitian Dan Pengembangan	Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target	%	80	85	106,25	Tercapai	Catatan: Komponen inovasi yang mencapai target melampaui target. Rekomendasi: Identifikasi komponen yang berhasil untuk direplikasi.
2. Aspek Pelayanan Umum	Inspektorat Daerah	Indeks Integritas	Angka	78	79,46	101,87	Tercapai	Catatan: Indeks integritas melampaui target. Rekomendasi: Perkuat program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas.
2. Aspek Pelayanan Umum	Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Angka	3,01	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi kapabilitas APIP.
2. Aspek Pelayanan Umum	Inspektorat Daerah	Level Maturitas SPIP	Angka	3,07	2,988	97,33	Tidak tercapai	Catatan: Level maturitas SPIP (2,988) sedikit di bawah target (3,07). Rekomendasi: Perkuat implementasi SPIP di seluruh Perangkat Daerah.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,15	84,21	100,07	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94,95	94,94	99,99	Tidak tercapai	Catatan: Realisasi (94,94) sedikit di bawah target (94,95), selisih 0,01 poin. Rekomendasi: Identifikasi aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,5	83,88	100,46	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	91,19	101,32	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target dengan baik. Rekomendasi: Jadikan percontohan bagi kecamatan lain.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,66	91,66	100	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini tepat mencapai target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87	87	100	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini tepat mencapai target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,2	85,13	101,1	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,79	84,82	100,04	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,89	88,19	100,34	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,89	88,94	100,06	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.

2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	91,05	100,05	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Jadikan percontohan bagi kecamatan lain.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	92,04	100,04	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Jadikan percontohan bagi kecamatan lain.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,6	88,75	100,17	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,6	84,76	100,19	Tercapai	Catatan: IKM kecamatan ini melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan kualitas pelayanan.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,2	71,51	96,37	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP di bawah target. Rekomendasi: Pembinaan intensif penyusunan SAKIP di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69,32	70,1	101,13	Tercapai	Catatan: Nilai SAKIP melampaui target. Rekomendasi: Jadikan percontohan bagi kecamatan lain.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71	70,11	98,75	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP sedikit di bawah target. Rekomendasi: Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70	66,5	95	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP di bawah target. Rekomendasi: Evaluasi dan pembinaan SAKIP di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,54	76,05	99,36	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP sedikit di bawah

								target. Rekomendasi: Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73	67,6	92,6	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP jauh di bawah target. Rekomendasi: PRIORITAS - Pembinaan intensif di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,25	68,2	99,93	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP sedikit di bawah target. Rekomendasi: Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72	71,85	99,79	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP sedikit di bawah target. Rekomendasi: Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72	69,8	96,94	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP di bawah target. Rekomendasi: Evaluasi dan pembinaan SAKIP di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77,01	75,75	98,36	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP sedikit di bawah target. Rekomendasi: Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75	72,75	97	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP di bawah target. Rekomendasi: Evaluasi dan pembinaan SAKIP di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,16	74,25	97,49	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP di bawah target. Rekomendasi: Evaluasi dan pembinaan SAKIP di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76	74,6	98,16	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP sedikit di bawah target. Rekomendasi: Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP.

2. Aspek Pelayanan Umum	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,5	69,65	94,76	Tidak tercapai	Catatan: Nilai SAKIP di bawah target. Rekomendasi: Evaluasi dan pembinaan SAKIP di kecamatan ini.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kasus konflik antar/intra umat beragama	kejadian	0	0	100	Tercapai	Catatan: Tidak terjadi konflik antar/intra umat beragama. Rekomendasi: Pertahankan kerukunan dan toleransi umat beragama.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	79,68	79,69	100,01	Tercapai	Catatan: Pemahaman masyarakat terhadap politik melampaui target. Rekomendasi: Tingkatkan pendidikan politik yang berkualitas.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Persentase Masyarakat yang paham terhadap	%	84,2	84,2	100	Tercapai	Catatan: Pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa tepat mencapai target. Rekomendasi: Perkuat wawasan kebangsaan dan bela negara.
2. Aspek Pelayanan Umum	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kesatuan Bangsa					Tidak tercapai	Catatan: Data tidak lengkap. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi reformasi birokrasi.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Nilai SAKIP Daerah	Angka	69,2	72,19	104,32	Tercapai	Catatan: Nilai SAKIP daerah melampaui target. Rekomendasi: Pertahankan dan tingkatkan kualitas implementasi SAKIP.

3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,12	3,17	101,6	Tercapai	Catatan: IPK melampaui target, persepsi anti-korupsi meningkat. Rekomendasi: Perkuat program transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,6	74,054	89,65	Tidak tercapai	Catatan: Penurunan drastis dari target. Rekomendasi: PRIORITAS TERTINGGI - Evaluasi penyebab penurunan, perbaiki sistem pengelolaan keuangan.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan	%	100	100	100	Tercapai	Catatan: Seluruh gangguan trantibum diselesaikan. Rekomendasi: Tingkatkan sistem deteksi dini dan pencegahan gangguan trantibum.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100	Tercapai	Catatan: Tidak terjadi konflik sosial. Rekomendasi: Pertahankan kerukunan dan kohesi sosial.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	7,11	7,92	111,39	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan investasi melampaui target dan di atas provinsi (6,76%). Rekomendasi: Pertahankan iklim investasi yang kondusif.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	%	0,23	0,24	102,54	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan nilai ekspor melampaui target. Rekomendasi: Tingkatkan diversifikasi dan daya saing produk ekspor.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Pengeluaran per Kapita yang	Rp. 000	11646	12014	103,16	Tercapai	Catatan: Daya beli masyarakat meningkat dan melampaui target. Rekomendasi: Jaga stabilitas

		Disesuaikan (PPP)						harga dan tingkatkan program pengendalian inflasi.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta/ orang	33,29	n/a	n/a	Tercapai	Catatan: Realisasi 2025 tidak tersedia. Rekomendasi: Lengkapi data untuk evaluasi produktivitas tenaga kerja.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	100	99,14	99,14	Tidak tercapai	Catatan: Aksesibilitas antar wilayah (99,14%) sedikit di bawah target. Rekomendasi: Tingkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Indeks Desa Membangun	Angka	19,34	29,22	151,09	Tercapai	Catatan: Peningkatan status desa sangat signifikan, melampaui target. Rekomendasi: Identifikasi faktor keberhasilan percepatan pembangunan desa.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Ketaatan terhadap RTRW	%	62,55	62,72	100,27	Tercapai	Catatan: Ketaatan terhadap RTRW melampaui target. Rekomendasi: Perkuat pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Emisi GRK	Gg CO2eq	1380	1497,07	91,52	Tidak tercapai	Catatan: Emisi GRK meningkat dan melampaui target. Rekomendasi: Implementasi kebijakan rendah karbon dan energi terbarukan.
3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	IKLH	Angka	72,6	67,95	93,6	Tidak tercapai	Catatan: Kualitas lingkungan hidup stagnan, gagal mencapai target. Rekomendasi: Perkuat pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan.

3. Aspek Daya Saing Daerah	Lintas urusan	Indeks Risiko Bencana	Angka	90,76	86	105,24	Tercapai	Catatan: Penurunan indeks risiko bencana (semakin rendah semakin baik) menunjukkan keberhasilan mitigasi bencana. Rekomendasi: Tingkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat.
----------------------------	---------------	-----------------------	-------	-------	----	--------	----------	---

ASPEK	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	JUMLAH	% TERCAPAI
1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	14	4	18	78%
2. Aspek Pelayanan Umum	99	29	128	77%
3. Aspek Daya Saing Daerah	12	4	16	75%
Jumlah/Persen	125	37	162	77%

URUSAN	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	JUMLAH	% TERCAPAI
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3	1	4	75%
Industri	2		2	100%
Inspektorat Daerah	2	1	3	67%
Kearsipan	2		2	100%
Kebudayaan	1		1	100%
Kecamatan	14	14	28	50%
Kelautan Dan Perikanan	3		3	100%
Kepegawaian	2		2	100%
Kepemudaan Dan Olahraga	5		5	100%
Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	1	4	75%

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4		4	100%
Keuangan	4		4	100%
Komunikasi Dan Informatika	2	1	3	67%
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3		3	100%
Lingkungan Hidup	4	2	6	67%
Lintas urusan	26	8	34	76%
Pangan	2		2	100%
Pariwisata	2		2	100%
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4	1	5	80%
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1		1	100%
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3		3	100%
Penanaman Modal	2	2	4	50%
Pendidikan	5		5	100%
Pendidikan Dan Pelatihan	2		2	100%
Penelitian Dan Pengembangan	1	1	2	50%
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2		2	100%
Perdagangan	2		2	100%
Perencanaan	2		2	100%
Perhubungan	2		2	100%
Perpustakaan		2	2	0%
Persandian	1		1	100%
Pertanahan		1	1	0%
Pertanian	1	1	2	50%
Perumahan Dan Pemukiman	2		2	100%

Sekretariat Daerah	3		3	100%
Sekretariat DPRD	1		1	100%
Sosial	3		3	100%
Statistik	1		1	100%
Tenaga Kerja	3		3	100%
Transmigrasi		1	1	0%
Jumlah/Persen	125	37	162	77%

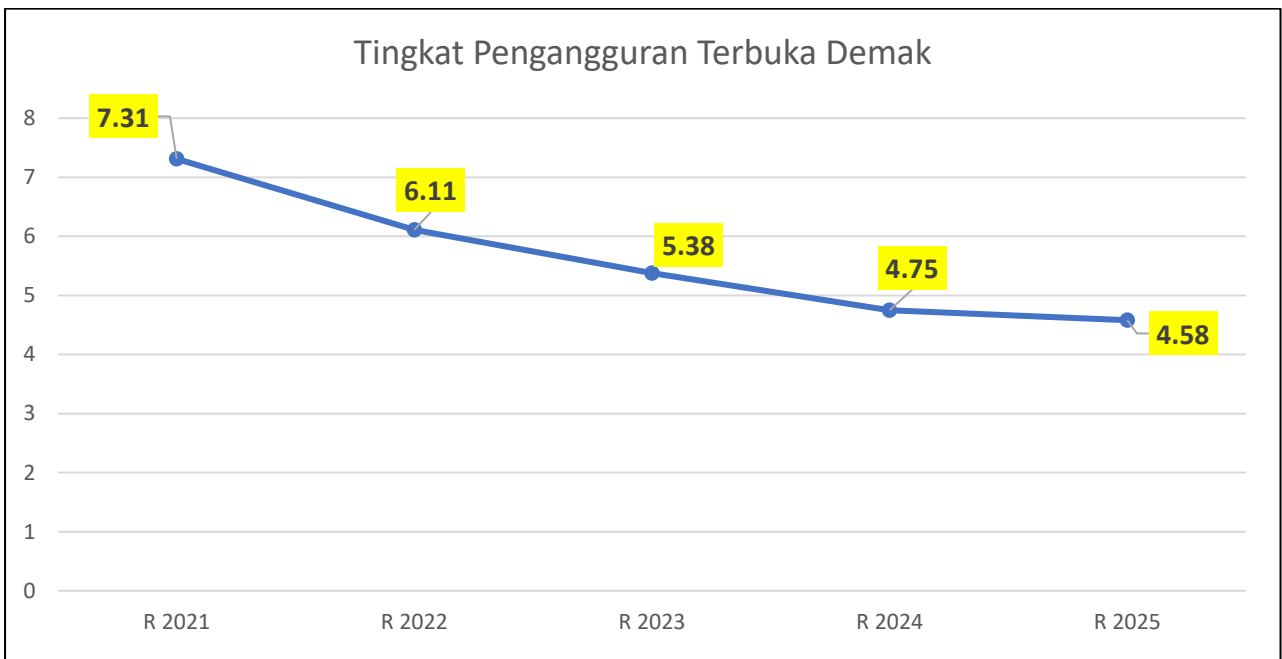
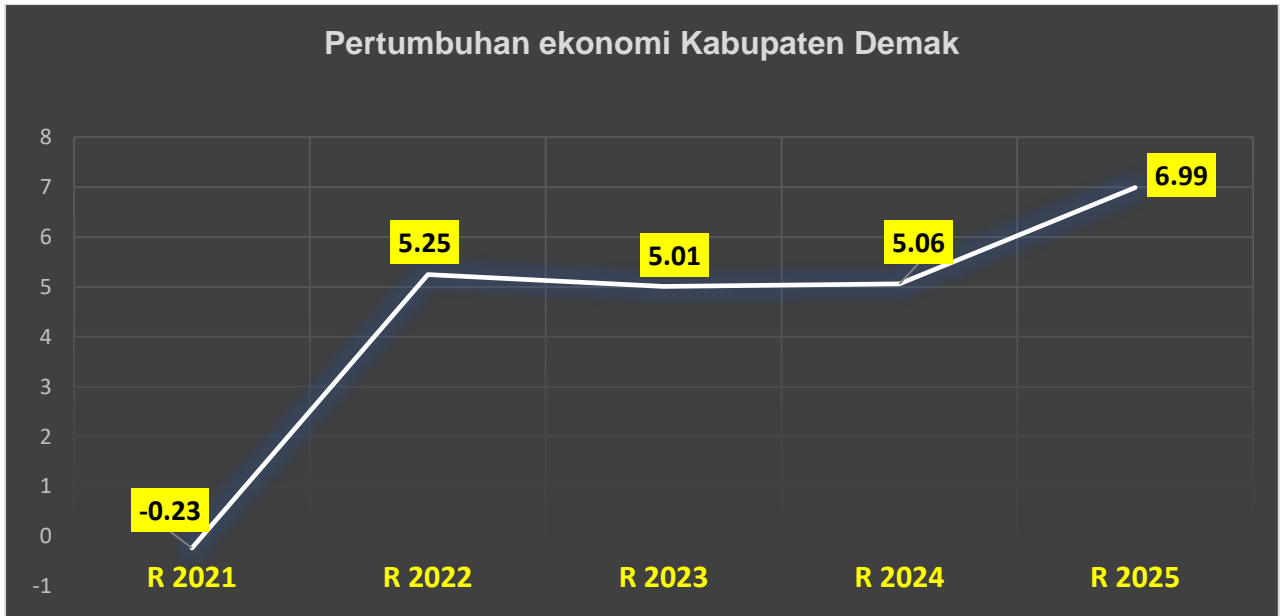
C. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025

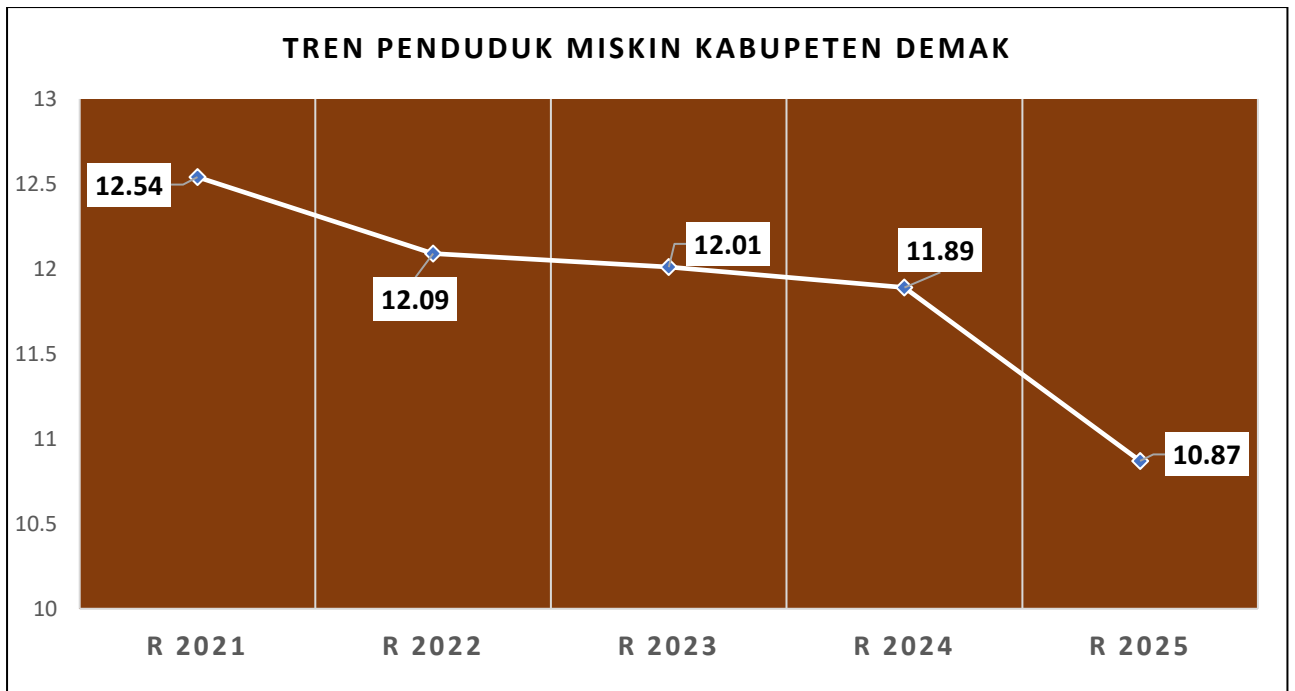
Dilaporkan dalam dokumen LKPJ TA 2025 bahwa, Beberapa indikator makro ekonomi tahun 2025 tumbuh semakin membaik pasca pandemi Covid 19. Berdasarkan data BPS capaian tahun 2025 bahwa, **ekonomi Kabupaten Demak tahun 2025 tumbuh positif 6,99%**, meningkat lebih baik dibanding dengan capaian tahun 2024 yang tumbuh 5,06%. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 turun 0,17 poin % dibanding tahun sebelumnya, dimana **TPT tahun 2025 sebesar 4,58%** dari 4,75% di tahun 2024 sedangkan **Angka Kemiskinan juga turun sebesar 1,02 poin %** dari tahun 2024, persentase **penduduk miskin menjadi 10,87%** ditahun 2025 dari 11,89% di tahun 2024. Gini ratio menurun dibanding tahun 2024 dimana gini ratio tahun 2025 sebesar 0,277 dari 0,31 di tahun 2024 hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, besaran angka tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan level rendah.

Berikut data capaian makro ekonomi dan kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2025 (data diolah dari LKPJ Bupati Demak TA 2025 dan BPS Jateng).

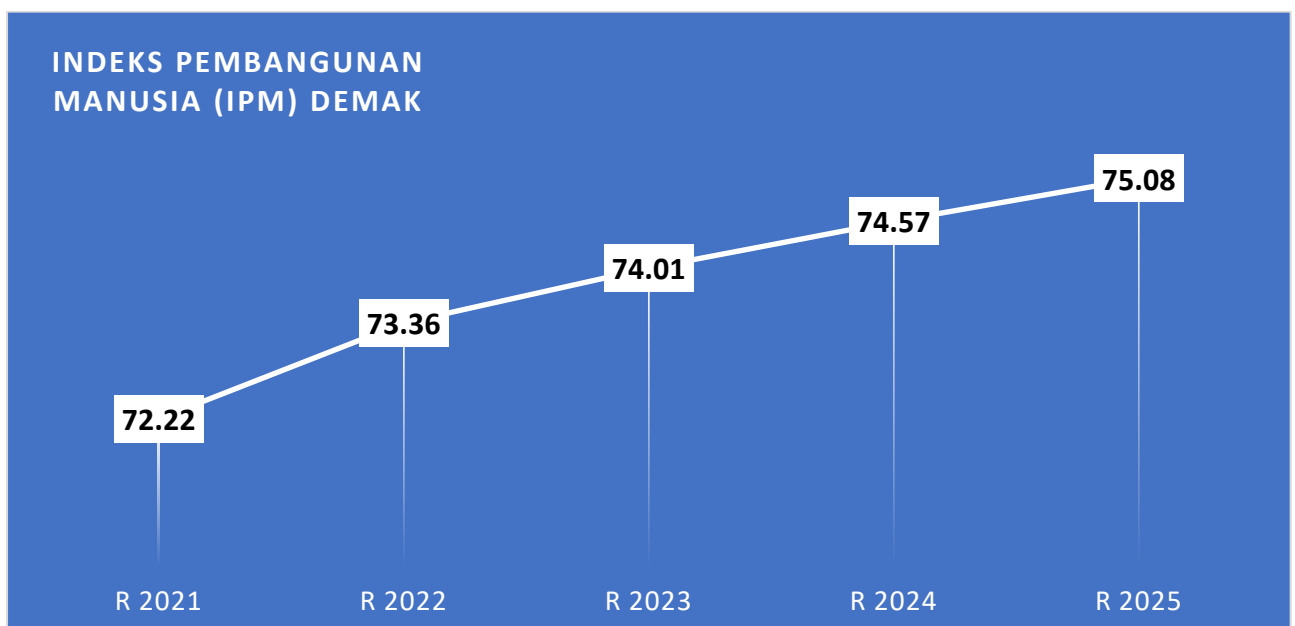
CAPAIAN MAKRO EKONOMI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

Makro	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	R 2025
Pertumbuhan ekonomi	-0,23	5,25	5,01	5,06	6,99
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,31	6,11	5,38	4,75	4,58
Kemiskinan	12,54	12,09	12,01	11,89	10,87
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22	73,36	74,01	74,57	75,08
PDRB per Kapita ADHK		24,73	26,62	28,3	30,65
Ketimpangan (Gini Ratio)		0,3	0,309	0,31	0,277





Hal yang cukup menggembirakan tapi belum membanggakan adalah capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2025 capaiannya **meningkat pada level diatas 75** yaitu sebesar **75,08** meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 IPM Kabupaten Demak sebesar 74,57.



IPM level 75,08 tersebut, diatas rata rata Provinsi Jawa Tengah, dimana **IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 rerata masih dibawah 75 sebesar 74,77.** Artinya Kabupaten Demak masih tetap termasuk Daerah Penyumbang IPM menengah di Provinsi Jawa Tengah. Jika diukur dari target RPJMD capaian IPM 2025 sebesar 75,08 tersebut diatas tidak memenuhi **target RPJMD tahun 2025 sebesar 75,42.** Artinya target RPJMD gagal dicapai.

Periode Pembangunan Tahun 2025 – 2029 merupakan tahun awal implementasi RPJPD baru periode Tahun 2025 – 2045 tahun **start Indonesia emas** yang maju berdaulat dan berkelanjutan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu Menyusun kebijakan konkrit dan realistis untuk Transformasi (perubahan) Sosial, Ekonomi dan tata Kelola pemerintahan, ke tiga perubahan mendasar akan tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjadi Solusi konkrit dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Sesuai arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045, untuk perbaikan dan akselerasi kebijakan pembangunan tahun 2026 dan tahun 2027, DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan hal hal sebagai berikut:

AGENDA	REKOMENDASI
<p>1. Meningkatkan infrastruktur berkualitas inklusif dan berkelanjutan</p>	<p>Pemerintah daerah harus mempunyai strategi dan arah kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah • Optimalisasi infrastruktur transportasi, akses energi, dan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. <p>Misalnya, pengembangan infrastruktur jalan harus diintegrasikan dengan kawasan pertanian dan sentra industri kecilmenengah, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pasar bagi produk</p>

	<p>lokal. Selain itu, pembangunan jaringan air bersih yang terintegrasi juga dapat mendukung sektor pariwisata, terutama di daerah dengan potensi wisata alam yang terus berkembang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Kabupaten Demak. • Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai.
<p>2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter</p>	<p>Pemda mampu merumuskan kebijakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan pendidikan yang berkualitas dan pemenuhan kompetensi standar angkatan kerja local melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan, kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; • Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) serta vokasi yang berkualitas. 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar Kesehatan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan <i>stunting</i> dan kecukupan gizi; • Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna.

	<p>3. Percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; • Peningkatan pendapatan masyarakat; • Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; • Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integrative; • Pemenuhan hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.
<p>4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berintegritas</p>	<p>Implementasi reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan teknologi informasi; • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; • Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. • Pemenuhan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses dan terjangkau melalui Peningkatan Digitalisasi Layanan Publik
<p>5. Peningkatan Perekonomian daerah yang berdaya saing</p>	<p>Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif melalui:</p>

<p>dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam permodalan dan pemasaran; • pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkelanjutan, dan berkualitas, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai <i>local advantage</i>. • pengembangan hilirisasi sektor unggulan berbasis kawasan ekonomi melalui: • penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; • peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan serta regenerasi petani millennial; • peningkatan kemandirian, produktivitas dan pemberdayaan perdesaan dalam pembangunan ekonomi wilayah.
-------------------------------------	---

D. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH.

D.1. REALISASI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Dokumen LKPJ Bupati Demak TA 2025 tentang Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, melaporkan bahwa:

Realisasi Pendapatan daerah tahun 2025 melampaui dari target sebesar **Rp.50.364.369.394**, atau ter-realisa sebesar **101,9%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp. 203.254.186.482**, atau ter-realisasi **92,7%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2025. APBD tahun 2025 setelah perubahan semula diproyeksi **Defisit Rp 171.217.674.971** pada Realisasinya justru surplus menjadi sebesar **Rp. 82.400.880.905**, Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini:

**RINGKASAN TARGET DAN REALISASI APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025 (UNAUDITED BPK)**

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	2.610.961.447.170	2.661.325.816.564	50.364.369.394	101,9%
Belanja Daerah	2.782.179.122.141	2.578.924.935.659	203.254.186.482	92,7%
Surplus/Defisit	(171.217.674.971)	82.400.880.905		
Pembiayaan Netto	171.217.674.971	171.256.472.096		
Sisa tahun berjalan	-	253.657.353.001	-	

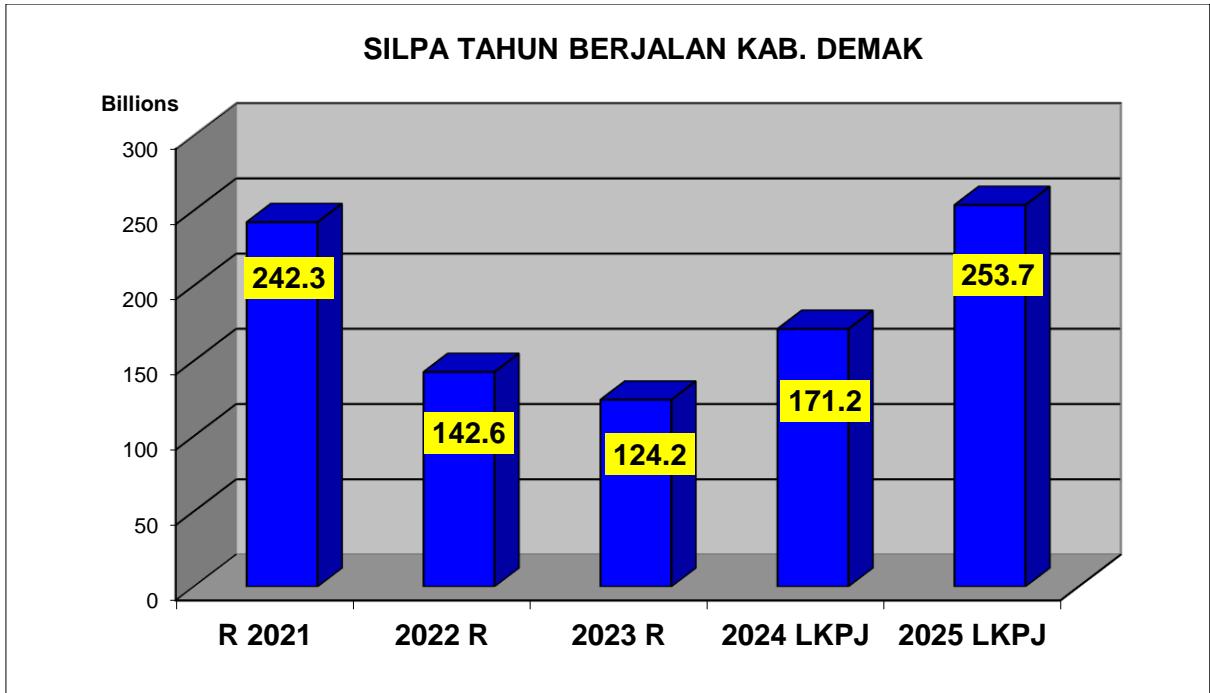
**RINGKASAN REALISASI APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	2025		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN	2.610.961.447.170	2.661.325.816.564	50.364.369.394	101,9%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.040.856.895	724.687.560.868	86.646.703.973	113,6%
Pajak daerah	287.837.738.497	340.767.833.524	52.930.095.027	118%
Retribusi daerah	307.438.169.398	329.599.739.266	22.161.569.868	107%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	33.959.699.000	38.477.679.571	4.517.980.571	113%
Lain - lain PAD yang sah	8.805.250.000	15.842.308.507	7.037.058.507	180%
PENDAPATAN TRNSFER	1.963.064.205.956	1.926.777.382.839	(36.286.823.117)	98,2%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.474.822.169.508	1.509.639.702.893	34.817.533.385	102,4%
Dana Transfer Umum	1.474.822.169.508	1.509.639.702.893	34.817.533.385	
Dana Bagi hasil pajak	1.474.822.169.508	1.509.639.702.893	34.817.533.385	102%
Dana Bagi hasil bukan pajak			-	
Dana bagi hasil cukai			-	
Dana Alokasi Umum			-	
Dana Alokasi Khusus Fisik			-	
Dana Alokasi khusus non fisik			-	

Dana insentif Daerah			-	
Dana Desa			-	
TRANSFER PEM. PUSAT LAINYA	282.893.766.000	221.984.381.524	(60.909.384.476)	78%
Dana Penyesuaian			-	#DIV/0!
			-	
TRANSFER ANTAR DAERAH	205.348.270.448	195.153.298.422	(10.194.972.026)	95,0%
Bagi hasil pajak/bukan pajak	141.000.270.448	131.270.431.705	(9.729.838.743)	93%
Bantuan Keuangan	64.348.000.000	63.882.866.717	(465.133.283)	99%
LAIN - 2 PENDAPATAN YG SAH	9.856.384.319	9.860.872.857	4.488.538	100,0%
Pendapatan Hbah		4.488.538	4.488.538	#DIV/0!
Dana Darurat			-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU	9.856.384.319	9.856.384.319	-	
BELANJA	2.782.179.122.141	2.578.924.935.659	203.254.186.482	92,7%
BELANJA OPERASI	2.097.774.650.558	1.975.565.414.646	122.209.235.912	94,2%
Belanja pegawai	1.114.958.187.286	1.037.230.057.560	77.728.129.726	93%
Belanja barang Jasa	886.989.966.272	848.321.266.555	38.668.699.717	96%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	82.965.510.000	78.218.668.531	4.746.841.469	94%
Belanja bantuan sosial	12.860.987.000	11.795.422.000	1.065.565.000	92%
BELANJA MODAL	239.177.959.437	221.122.666.897	18.055.292.540	92,5%
Tanah			-	
Peralatan dan Mesin	90.180.705.927	79.211.657.041	10.969.048.886	88%
Gedung dan bangunan	46.825.637.409	42.369.633.602	4.456.003.807	90%
Jalan jaringan dan Irigasi	90.271.142.307	87.752.972.060	2.518.170.247	97%
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	11.799.473.794	11.724.364.194		99%
Belanja Modal Aset lainnya	101.000.000	64.040.000	(36.960.000)	
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.541.000.000	339.610.000	1.201.390.000	22,0%
Belanja tidak terduga	1.541.000.000	339.610.000	1.201.390.000	
BELANJA TRANSFER	443.685.512.146	381.897.244.116	61.788.268.030	86,1%
Transfer Hasil Pendapatan	26.863.712.846	26.714.829.292	148.883.554	99%

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	22.415.694.336	22.359.694.336	56.000.000	100%
Belanja Bagi Hasil Retribusi	4.448.018.510	4.355.134.956	92.883.554	
Transfer Bantuan Keuangan	416.821.799.300	355.182.414.824	61.639.384.476	85%
Transfer Bantuan Keuangan	416.821.799.300	355.182.414.824	61.639.384.476	85%
Surplus / (Devisit)	(171.217.674.971)	82.400.880.905	(253.618.555.876)	-48,1%
PEMBIAYAAN			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.217.674.971	171.256.472.096	38.797.125	100,0%
Silpa tahun sebelumnya	171.217.674.971	171.217.674.971	-	100%
Pencairan dana cadangan			-	
Hasil penj. kekada yg dipisahkan			-	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
Penerimaan piutang daerah		38.797.125	38.797.125	
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
Pembentukan dana cadangan			-	
Penyertaan modal (investasi)			-	
Pembayaran pokok utang			-	
Pembiayaan netto	171.217.674.971	171.256.472.096	38.797.125	100,0%
SILPA THN BERJALAN	-	253.657.353.001		9,0%

SILPA Tahun Anggaran 2025 *unaudited* (indikatif) belum dilaporkan besarnya dalam dokumen LKPJ Bupati Demak TA 2025, silpa ***unadited*** Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.253.657.353.001,-** senilai 9,0 % dari realisasi dana tersedia secara nominal meningkat nilainya dibanding tahun sebelumnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tren grafik SILPA berikut ini:



Saldo Piutang Daerah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp74.547.333.556,23** mengalami Peningkatan sebesar Rp. 16.623.292.113,12 Jika dibandingkan jumlah piutang Tahun 2023 sebesar **Rp57.924.041.443,11**. berikut rincian dalam neraca daerah.

NO	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	Piutang Pajak	51.798.598.825,00	41.446.749.542,00	10.351.849.283,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(16.902.823.277,12)	(12.293.220.451,28)	(4.609.602.825,84)
	Piutang Pajak Netto	34.895.775.547,88	29.153.529.090,72	5.742.246.457,16
2	Piutang Retribusi	5.424.302.615,00	4.204.373.237,00	1.219.929.378,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.458.370.073,47)	(3.684.713.323,25)	(773.656.750,22)
	Piutang Retribusi Netto	965.932.541,53	519.659.913,75	446.272.627,78
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	41.330.083.758,55	34.498.245.393,00	6.831.838.365,55
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(15.934.100.617,48)	(13.884.535.312,56)	(2.049.565.304,92)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	25.395.983.141,07	20.613.710.080,44	4.782.273.060,63
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.356.424.448,00	7.675.519.958,00	5.680.904.490,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(66.782.122,25)	(38.377.599,80)	(28.404.522,45)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	13.289.642.325,75	7.637.142.358,20	5.652.499.967,55
	JUMLAH	74.547.333.556,23	57.924.041.443,11	16.623.292.113,12

Dari tabel diatas nampak bahwa piutang terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu piutang pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp.51.798.598.825,00 (sebagian besar merupakan piutang PBB P2 bruto sebesar Rp. 43.255.449.565,00, kemudian jumlah terbesar kedua piutang lain lain PAD yang sah Rp. 41.330.083.758,55 terbesar merupakan piutang BLUD (Puekesmas dan RSUD) sebesar Rp.28.229.914.023,00, juga meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya, kemudian piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya juga meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya.

Sampai tahun buku 2024 masih terdapat saldo **Penyisihan Piutang** (piutang macet tak tertagih) dan mengalami kenaikan, Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (37.428.858.212,57) meningkat jumlahnya dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(29.939.224.286,69).

**RINGKASAN REALISASI APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021 – 2025**

U R A I A N	R 2021	2022 R	2023 R	2024 LKPJ	2025 LKPJ
PENDAPATAN	2.365.244.759.686	2.402.717.869.624	2.416.786.383.470	2.704.160.189.102	2.662.043.310.364
PENDAPATAN ASLI DAERAH	445.010.135.309	477.198.401.099	508.055.346.278	594.879.719.501	724.687.560.868
Pajak daerah	165.776.090.682	187.735.572.043	194.225.836.352	223.506.943.362	340.767.833.524
Retribusi daerah	24.230.487.613	27.532.629.554	28.944.222.183	40.972.036.564	329.599.739.266
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	22.845.412.595	24.738.037.893	28.824.607.451	32.847.401.892	38.477.679.571
Lain - lain PAD yang sah	232.158.144.419	237.192.161.609	256.060.680.292	297.553.337.683	15.842.308.507
DANA PERIMBANGAN	1.230.848.488.721	1.315.198.929.174	1.350.988.404.855	1.852.443.800.973	1.509.639.702.893
Bagi hasil pajak/Bukan pajak		24.110.055.084	70.207.201.133		
Bagi Hasil bukan pajak		33.876.912.685			
Dana alokasi umum		856.459.969.000	872.433.475.808		
Dana alokasi khusus		400.751.992.405	408.347.727.914		
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	689.386.135.656	610.320.539.351	557.742.632.337	256.836.668.628	427.716.046.603
Dana hibah	126.603.354.070	11.043.308.756	12.174.142.367	5.708.106.446	4.488.538
DBH pajak dr prov. & pemda lainnya	184.791.228.586	199.350.328.595	198.037.617.770	250.411.068.382	131.270.431.705

Dana penyesuaian & DD	284.463.387.000	330.195.314.000	262.545.878.000		221.984.381.524
Bantuan keu dr prov./pemda lainnya	38.408.240.000	69.666.588.000	53.390.621.000		63.882.866.717
pendapatan Lainnya /DID	55.119.926.000	65.000.000	31.244.228.000		9.856.384.319
Pendapatan lainnya			350.145.200	717.493.800	717.493.800
BELANJA	2.336.015.725.797	2.487.342.627.299	2.423.260.278.246	2.655.133.935.831	2.578.924.935.659
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.381.436.917.591	1.466.358.735.494	1.475.812.043.055	1.592.403.131.916	1.509.481.002.207
Belanja pegawai	845.439.143.422	888.872.460.290	902.275.284.033	1.009.311.372.825	1.037.230.057.560
Belanja bunga					
Belanja subsidi					
Belanja hibah	69.147.270.009	97.499.400.243	125.045.549.314	131.867.184.339	78.218.668.531
Belanja bantuan sosial	29.464.770.000	39.511.175.770	32.802.750.000	13.948.600.000	11.795.422.000
Blj bagi hasil kpd prov/kab/kota & pemdes	18.372.347.160	19.317.115.191	21.980.042.858	22.880.158.252	26.714.829.292
Bant. keu. kpd prov/kab/kota & pemdes	419.013.387.000	421.158.584.000	393.705.930.850	414.395.816.500	355.182.414.824
Belanja tidak terduga			2.486.000		339.610.000
BELANJA LANGSUNG	954.578.808.206	1.020.983.891.805	947.448.235.191	1.062.730.803.915	1.069.443.933.452
Belanja pegawai					
Belanja barang & jasa	674.656.322.534	676.682.525.320	674.917.299.073	783.547.087.306	848.321.266.555
Belanja modal	279.922.485.672	344.301.366.485	272.530.936.118	279.183.716.609	221.122.666.897

Surplus / (Devisit)	29.229.033.889	(84.624.757.675)	(6.473.894.776)	49.026.253.271	
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	245.029.903.754	242.262.250.642	142.637.921.267	124.183.273.166	171.256.472.096
Penggunaan SILPA sebelumnya	245.029.903.754	242.258.937.642	142.637.492.967	124.164.026.491	171.217.674.971
Pencairan dana cadangan					
Hasil pengelolaan kekada yang dipisah					
Penerimaan pinjaman daerah					
Penerimaan kembali pemberian pinjaman		3.313.000	428.300	19.246.675	38.797.125
Jumlah penerimaan	245.029.903.754	242.262.250.642	142.637.921.267	124.183.273.166	171.256.472.096
Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000	15.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	0
Pembentukandana cadangan					
Penyertaan modal (investasi) pemerintah	32.000.000.000	15.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	
Pembayaran pokok utang					
Pemberian pinjaman daerah					
Pengeluaran dana talangan					
Pembayaran hutang jangka pendek					
Jumlah pengeluaran	32.000.000.000	15.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	0

Pembiayaan netto	213.029.903.754	227.262.250.642	130.637.921.267	122.183.273.166	171.256.472.096
(SILPA)	242.258.937.642	142.637.492.967	124.164.026.491	171.209.526.437	253.657.353.001

BAB III REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI
1	BPKPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab II LKPJ agar diuraikan Perubahan Penjabaran APBD berdasarkan Peraturan Bupati dan dasar/regulasi yang memerintahkan . 2. Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,99% agar dijelaskan faktor penyebab dan sektor yang mendorong nya. 3. SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.253.657.353.001,- agar dilaporkan berapa besaran SILPA yang bebas dan berapa besaran SILPA yang terikat ? 4. Mendorong penyerapan APBD sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang memang penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya. 5. Terus melakukan Langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas SILPA Tahun Anggaran 2025 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar. 6. Saldo Piutang Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp74.547.333.556,23 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 16.623.292.113,12 Jika dibandingkan jumlah piutang Tahun 2024 sebesar Rp57.924.041.443,11. Segera bentuk Tim Penyelesaian Piutang Daerah seharusnya ada progress penurunan piutang daerah per tahun. Evaluasi Petugas Retribusiu Daerah, terapkan reward and punishment karena pengelolaan atas Pajak PBB-P2 merupakan salah satu temuan BPK.

		<p>7. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah sangat mendesak dilakukan (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retibusi dan pungutan lainnya seperti pendapatan BLUD RSUD). Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas</p> <p>8. Menyusun program program yang in line dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK</p> <p>9. Meyehatkan BLUD (RSUD) agar dalam jangka Panjang lebih mandiri sehingga dari sisi keuangan tidak menjadi beban APBD. Bila diperlukan pisahkan Belanja Pegawai pada BLUD (RSUD).</p> <p>10. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)</p> <p>11. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tidak tercapai, Lakukan restrukturisasi postur APBD agar sesuai dengan batasan mandatory spending</p>
2	INSPEKTORAT	<p>1. Indikator Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) tidak tercapai, perkuat implementasi SPIP di seluruh Perangkat Daerah.</p> <p>2. Nilai SAKIP yang di eluarkan oleh Inspektorat terhadap OPD ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, nilai bagus tapi realisasi kinerja OPD sangat tidak baik dan masih banyak kritikan dari Masyarakat.</p> <p>3. Perlunya pendampingan lebih serius pada Kecamatan dikarenakan capaian IKM dan SAKIP di bawah target.</p>
3	DISPENDUKCAPIL	<p>Indikator Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik tidak tercapai. Lakukan Layanan jemput bola</p>

		dan layanan keliling untuk menjangkau penduduk yang belum memiliki KTP elektronik
4	BKPSDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi tidak terukur (n/a) . Lengkapi data pendukung pada LKPJ agar dapat dilakukan evaluasi. 2. Banyaknya Plt bertahun tahun tidak terselesaikan, bahkan hari ini 24 Plt. ini sangat memperburuk kinerja dinas/instansi, Segera mengisi kekosongan jabatan agar pejabat fokus menangani satu urusan pemerintahan. Komisi A merekomendasikan dibentuk PANSUS
5	DINPERMASDES	Kinerja Dinpermades sangat tidak efektif dalam koordinasi penyelenggaraan PILPERADES, banyak problem dan aduan masyarakat di beberapa desa yang tidak terselesaikan dan adanya banyak indikasi kecurangan yang ditemukan dalam proses PILPERADES. Maka komisi A merekomendasikan dibentuk PANSUS
6	DINDAGKOP UKM	Optimalisasi Aset Daerah yaitu bekas Terminal Bintoro untuk rencana relokasi Pasar Krempeyeng merupakan solusi cerdas untuk penataan kota, asalkan didukung dengan penyediaan fasilitas yang layak dan manajemen transisi yang baik bagi pedagang.
7	DINPERTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan Solusi kebijakan untuk menangani permasalahan tentang Sawah Tenggelam. yang dihadapi Masyarakat. 2. Antisipasi alih fungsi lahan produktif dengan mematuhi pembagian tata ruang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait

8	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi BUMD jangan hanya mengandalkan sumber dana melalui penyertaan modal. BUMD agar lebih kreatif penggalan sumber dana lainnya dan mengefisienkan belanja. 2. Perbaiki Tata Kelola Manajemen BUMD, Lakukan Fit and Proper Test dalam penempatan jabatan Direksi
9	DINPUTARU	<p>Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik tidak tercapai, perlu dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan program rehabilitasi dan pemeliharaan drainase secara berkala. 2. Penyusunan Masterplan Drainase yang detail dan komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi . 3. Koordinasi Lintas Sektor antara BBWS, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Provinsi. 4. Skala Prioritas Anggaran memfokuskan alokasi APBD pada wilayah langganan banjir atau titik genangan tertinggi yang berdampak pada mobilitas ekonomi Masyarakat.
10	DINDIKBUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami kegagalan dalam meningkatkan Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah tidak tercapai 2. Banyaknya rangkap jabatan dan Pejabat Plt. di lingkungan DINDIKBUD khususnya Kepala Sekolah. Definitifkan semua Kepala Sekolah di lingkungan Kabupaten Demak
11	DINKES	<p>Ketidaksesuaian antara laporan Dinas Kesehatan dan kondisi riil di lapangan merupakan permasalahan serius yang sering disorot, terutama dalam konteks validasi data Kesehatan sehingga perlu dilakukan :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi lapangan (ground-check) untuk memastikan data riil, seperti dalam kasus penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), di mana pendamping lapangan mengetahui kondisi sebenarnya. 2. Investigasi dan Pengawasan: Investigasi tim pencari fakta seringkali menemukan perbedaan hasil, contohnya dalam kasus dugaan keracunan makanan bergizi di mana Dinas Kesehatan setempat terkadang tidak dilibatkan dalam pengawasan. 3. Penutupan Layanan: Laporan yang tidak sesuai dapat berdampak pada operasional lapangan, seperti kasus penutupan sementara Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kebonagung 4. Banyaknya rangkap jabatan dan Pejabat Plt. di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak khususnya Kepala Puskesmas agar segera diatasi dengan proses definitifkan Kepala Puskesmas di Kabupaten Demak.
12	RSUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan Layanan Unggulan : Refocusing skala prioritas BLUD RSUD kepada layanan - layanan unggulan yang memberi daya ungkit nyata pada pendapatan, (Sebagai referensi, RSUD tipe C dengan layanan unggulan bedah orthopaedi seperti ganti sendi panggul dan lutut (Total Knee and Hip Replacement), Nilai klaim JKNnya berkali lipat lebih baik dari hanya operasi patah tulang biasa pada umumnya, atau RSUD tipe C dan D dengan layanan unggulan ICU/NICU/PICU dimana untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator >96 jam, nilai klaim JKNnya pun berkali lipat lebih baik dari pasien rawat inap pada umumnya

		<p>2. Perbaiki manajemen keuangan RSUD : Atasi Kebocoran Yang Paling Cepat Dan Berdampak BLUD RSUD harus segera membereskan klaim yang di tunda pembayarannya oleh BPJS hanya karena urusan administratif berkas medis yang tidak lengkap, manajemen disarankan menjadikan kelengkapan mengisi bekas sebagai salah satu indikator kinerja utama pegawai di RSUD) Sebagai referensi, beberapa daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, bila berkas tidak lengkap, BPJS memberi kesempatan RSUD hanya 1 kali perbaikan sebelum di kategorikan "tidak layak" dan tidak dapat dibayar</p> <p>3. Digitalisasi pelayanan RSUD.</p> <p>Digitalisasi ERM (electronic rekam medis) yang di ikuti oleh Full Birging dengan E-Klaim Kemenkes. Kombinasi ini membuat RSUD mengetahui nilai klaim pasien JKN sejak di awal IGD, sehingga manajemen RSUD bisa memberi layanan terukur tanpa takut merugi di kemudian hari</p> <p>Digitalisasi sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), sistem ini mencocokkan data dari ERM dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), SOP RS dan Berita Acara Kesepakatan dengan BPJS. Sehingga ada perbaikan potensi kesalahan medis, fraud dan kebocoran jauh sebelum pasien pulang</p>
--	--	---

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Data LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 Capaian Kinerja berdasarkan Misi/Tujuan Daerah tercapai sebanyak 2 indikator atau dengan persentase **40%**. tidak tercapai 2 indikator dan tidak terukur 1 indikator. Capaian Kinerja berdasarkan Misi/Sasaran Daerah tercapai sebanyak 12 indikator atau dengan persentase **75%**. tidak tercapai 3 indikator dan tidak terukur 1 indikator

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama tercapai sebanyak 14 indikator atau dengan persentase **67%**. tidak tercapai 5 indikator dan tidak terukur 2 indikator. Capaian Kinerja berdasarkan Aspek Urusan tercapai sebanyak 125 indikator atau dengan persentase **77%**. tidak tercapai 37 indikator.

Rekomendasi/Catatan Strategis ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Demak agar semakin baik dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demikian hasil telaah DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati demak Tahun Anggaran 2025.



LAPORAN RAPAT PIMPINAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

BUPATI DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2025.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 45, Demak, Jawa Tengah 59571
Telepon (0291) 685577, Faksimile (0291) 681480
Laman dprd.demakkab.go.id, Pos-el dprd.demakkab@gmail.com



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**LAPORAN
RAPAT KONSULTASI PIMPINAN
BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D, PIMPINAN
BAPEMPERDA DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN**

Nomor : 172.14 / 4 / R.KONSULTASI / DPRD / 2026

Tahun Sidang	: 2026
Masa Persidangan	: I (Kesatu)
Rapat Ke-	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Selasa, 21 April 2026
Waktu	: 9.30 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan
Acara	: Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025
Ketua Rapat	: Zayinul Fata, S.E. (Ketua DPRD Kabupaten Demak - Fraksi PKB)
Sekretaris Rapat	: Muh. Muchlis, S.E., M.Si. (Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak)
Hadir	: DPRD KABUPATEN DEMAK : 21 orang hadir dari jumlah 26 orang dengan rincian

PIMPINAN :

- 1) Zayinul Fata, S.E. (Ketua DPRD Kabupaten Demak - Fraksi PKB)
- 2) S. Fahrudin Bisri Slamet, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak - Fraksi PDI Perjuangan)
- 3) Ike Chandra Agustina, S.Kom. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak - Fraksi Golkar)
- 4) Maskuri, S.Ag. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak - Fraksi Gerindra)

ANGGOTA :

- 1) Sukono (Ketua Fraksi PKB)
- 2) Danang Saputro, S.H. (Ketua Fraksi Gerindra)
- 3) Sulkan (Ketua Fraksi Nasdem)
- 4) Bambang Setyo Utomo, M.H. (Ketua Fraksi DPS)
- 5) Muadhom, S.Pd.I. (Ketua Komisi A - Fraksi PKB)
- 6) Sudarno, S.Sos. (Wakil Ketua Komisi A - Fraksi PDI P)
- 7) Fatkhan, S.H. (Sekretaris Komisi A - Fraksi DPS)
- 8) Muh. Safii, S.Pd.I. (Sekretaris Komisi B - Fraksi PKB)
- 9) Ulin Nuha, S.Pd.I. (Ketua Komisi C - Fraksi PKB)
- 10) Sonhaji, S.H. (Wakil Ketua Komisi C - Fraksi PDI P)

- 11)Muntohar, S.H. (Sekretaris Komisi C - Fraksi Gerindra)
- 12)Mohamad Asyhadi, S.Hum. (Wakil Ketua Komisi D - Fraksi PKB)
- 13)Faozan, S.H. (Sekretaris Komisi D - Fraksi PDI P)
- 14)Busro, S.Pd. (Ketua Bapemperda - Fraksi PDI P)
- 15)Isa Ansori, S.T. (Wakil Ketua Bapemperda - Fraksi PKB)
- 16)Ibrahim Suyuti, S.H. (Ketua Badan Kehormatan - Fraksi Nasdem)
- 17)Ahmad Mansur, S.E. (Wakil Ketua Badan Kehormatan - Fraksi Gerindra)

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib tentang DPRD Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib tentang DPRD Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

1. Memyelaraskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 oleh Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak.
2. Sebagai dasar penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Demak

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

A. Ringkasan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. BPKPAD

- a. Bab II LKPJ agar diuraikan Perubahan Penjabaran APBD berdasarkan Peraturan Bupati dan dasar/regulasi yang memerintahkan .
- b. Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,99% agar dijelaskan faktor penyebab dan sektor yang mendorong nya.
- c. SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.253.657.353.001,- agar dilaporkan berapa besaran SILPA yang bebas dan berapa besaran SILPA yang terikat ?
- d. Mendorong penyerapan APBD sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang memang penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya.
- e. Terus melakukan Langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas SILPA Tahun Anggaran 2025 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.
- f. Saldo Piutang Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp74.547.333.556,23 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 16.623.292.113,12 Jika dibandingkan jumlah piutang Tahun 2024 sebesar Rp57.924.041.443,11. Segera bentuk Tim Penyelesaian Piutang Daerah seharusnya ada progress penurunan piutang daerah per tahun. Evaluasi Petugas Retribusiu Daerah, terapkan reward and punishment karena pengelolaan atas Pajak PBB-P2 merupakan salah satu temuan BPK.
- g. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah sangat mendesak dilakukan (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya seperti pendapatan BLUD RSUD). Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas
- h. Menyusun program program yang in line dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK

- i. Meyehatkan BLUD (RSUD) agar dalam jangka Panjang lebih mandiri sehingga dari sisi keuangan tidak menjadi beban APBD. Bila diperlukan pisahkan Belanja Pegawai pada BLUD (RSUD).
- j. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- k. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tidak tercapai, Lakukan restrukturisasi postur APBD agar sesuai dengan batasan mandatory spending

2. INSPEKTORAT

- a. Indikator Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) tidak tercapai, perkuat implementasi SPIP di seluruh Perangkat Daerah.
- b. Nilai SAKIP yang di keluarkan oleh Inspektorat terhadap OPD ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, nilai bagus tapi realisasi kinerja OPD sangat tidak baik dan masih banyak kritikan dari Masyarakat. Perlunya pendampingan lebih serius pada Kecamatan dikarenakan capaian IKM dan SAKIP di bawah target.

3. DISPENDUKCAPIL

Indikator Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik tidak tercapai. Lakukan Layanan jemput bola dan layanan keliling untuk menjangkau penduduk yang belum memiliki KTP elektronik

4. BKPSDM

- a. Indeks Reformasi Birokrasi tidak terukur (n/a) . Lengkapi data pendukung pada LKPJ agar dapat dilakukan evaluasi.
- b. Banyaknya Plt bertahun tahun tidak terselesaikan, bahkan hari ini 24 Plt. ini sangat memperburuk kinerja dinas/instansi, Segera mengisi kekosongan jabatan agar pejabat fokus menangani satu urusan pemerintahan.

5. DINPERMASDES

Kinerja Dinpermades sangat tidak efektif dalam koordinasi penyelenggaraan PILPERADES, banyak problem dan aduan masyarakat di beberapa desa yang tidak terselesaikan dan adanya banyak indikasi kecurangan yang ditemukan dalam proses PILPERADES.

6. DINDAGKOP UKM

Optimalisasi Aset Daerah yaitu bekas Terminal Bintoro untuk rencana relokasi Pasar Krempyeng merupakan solusi cerdas untuk penataan kota, asalkan didukung dengan penyediaan fasilitas yang layak dan manajemen transisi yang baik bagi pedagang.

7. DINPERTAN

- a. Perlu dilakukan Solusi kebijakan untuk menangani permasalahan tentang Sawah Tenggelam. yang dihadapi Masyarakat.
- b. Antisipasi alih fungsi lahan produktif dengan mematuhi pembagian tata ruang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait

8. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA

- a. Revitalisasi BUMD jangan hanya mengandalkan sumber dana melalui penyertaan modal. BUMD agar lebih kreatif penggalan sumber dana lainnya dan mengefisienkan belanja.
- b. Perbaiki Tata Kelola Manajemen BUMD, Lakukan Fit and Proper Test dalam penempatan jabatan Direksi

9. DINPUTARU

Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik tidak tercapai, perlu dilakukan :

- a. Tingkatkan program rehabilitasi dan pemeliharaan drainase secara berkala.
- b. Penyusunan Masterplan Drainase yang detail dan komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi .
- c. Koordinasi Lintas Sektor antara BBWS, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Provinsi.
- d. Skala Prioritas Anggaran memfokuskan alokasi APBD pada wilayah langganan banjir atau titik genangan tertinggi yang berdampak pada mobilitas ekonomi Masyarakat.

10. DINDIKBUD

- a. Mengalami kegagalan dalam meningkatkan Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah tidak tercapai
- b. Banyaknya rangkap jabatan dan Pejabat Plt. di lingkungan DINDIKBUD khususnya Kepala Sekolah. Definitifkan semua Kepala Sekolah di lingkungan Kabupaten Demak

11. DINKES

Ketidaksesuaian antara laporan Dinas Kesehatan dan kondisi riil di lapangan merupakan permasalahan serius yang sering disorot, terutama dalam konteks validasi data Kesehatan sehingga perlu dilakukan :

- a. Verifikasi lapangan (ground-check) untuk memastikan data riil, seperti dalam kasus penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), di mana pendamping lapangan mengetahui kondisi sebenarnya.

- b. Banyaknya rangkap jabatan dan Pejabat Plt. di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak khususnya Kepala Puskesmas agar segera diatasi dengan proses definitif Kepala Puskesmas di Kabupaten Demak.

12. RSUD

- a. Rintisan Layanan Unggulan : Refocusing skala prioritas BLUD RSUD kepada layanan - layanan unggulan yang memberi daya ungkit nyata pada pendapatan, (Sebagai referensi, RSUD tipe C dengan layanan unggulan bedah orthopaedi seperti ganti sendi panggul dan lutut (Total Knee and Hip Replacement), Nilai klaim JKNnya berkali lipat lebih baik dari hanya operasi patah tulang biasa pada umumnya, atau RSUD tipe C dan D dengan layanan unggulan ICU/NICU/PICU dimana untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator >96 jam, nilai klaim JKNnya pun berkali lipat lebih baik dari pasien rawat inap pada umumnya
- b. Perbaiki manajemen keuangan RSUD : Atasi Kebocoran Yang Paling Cepat Dan Berdampak BLUD RSUD harus segera membereskan klaim yang di tunda pembayarannya oleh BPJS hanya karena urusan administratif berkas medis yang tidak lengkap, manajemen disarankan menjadikan kelengkapan mengisi bekas sebagai salah satu indikator kinerja utama pegawai di RSUD) Sebagai referensi, beberapa daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, bila berkas tidak lengkap, BPJS memberi kesempatan RSUD hanya 1 kali perbaikan sebelum di kategorikan "tidak layak" dan tidak dapat dibayar
- c. Digitalisasi pelayanan RSUD.
Digitalisasi ERM (electronic rekam medis) yang di ikuti oleh Full Birging dengan E-Klaim Kemenkes. Kombinasi ini membuat RSUD mengetahui nilai klaim pasien JKN sejak di awal IGD, sehingga manajemen RSUD bisa memberi layanan terukur tanpa takut merugi di kemudian hari
- d. Digitalisasi sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), sistem ini mencocokkan data dari ERM dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), SOP RS dan Berita Acara Kesepakatan dengan BPJS. Sehingga ada perbaikan potensi kesalahan medis, fraud dan kebocoran jauh sebelum pasien pulang

Secara detail rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak tercantum dalam Lampiran Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025.


III. PENUTUP

:

Setelah dilaksanakan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD, Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan sepakat dilakukan penetapan rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna.

Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53 / 1 / KOM.A / 2026, Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53 / 1 / KOM.B / 2026, Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53 / 12 / KOM.C / 2026, Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53 / 1 / KOM.D / 2026 Tanggal 19 April 2026 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan laporan ini.

Rapat ditutup pukul 12.05 WIB.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Ketua
ZAYINUL FATA, S.E.

LAPORAN RAPAT KOMISI A, B, C DAN D

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

**BUPATI DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025.**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 45, Demak, Jawa Tengah 59571
Telepon (0291) 685577, Faksimile (0291) 681480
Laman dprd.demakkab.go.id, Pos-el dprd.demakkab@gmail.com



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**LAPORAN
RAPAT KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)**

**INSPEKTORAT, BKPSDM, BAKESBANGPOL, DINDUK CAPIL, DINPEMADES,
PAGUYUBAN CAMAT KABUPATEN DEMAK**

Nomor: 171.53 / 1 / KOM.A / DPRD /2026

Tahun Sidang	: 2026
Masa Persidangan	: 1 (Satu)
Rapat Ke-	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Komisi
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Maret 2026
Waktu	: 12.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak
Acara	: Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025
Ketua Rapat	: MUADHOM, S. Pd.I (Ketua Komisi A - Fraksi PKB)
Sekretaris Rapat	: FATKHAN, SH (Sekretaris Komisi A - Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera)
Hadir	: A. DPRD KABUPATEN DEMAK 6 orang anggota hadir dari jumlah 10 orang anggota dengan rincian: <ol style="list-style-type: none">1. Muadhom, S. Pd.I. (Ketua Komisi A-Fraksi PKB)2. Fatkhan, SH (Sekretaris Komisi A-Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera)3. Sasriah. (Anggota Komisi A-Fraksi PKB)4. Kresna Bayu Ilham sumarno, SH (Anggota Komisi A-Fraksi PDIP)5. Muhammad Ali Muhamar. (Anggota Komisi A-Fraksi Gerindra)

6. Hj. Endang Susilowati, S.Sos., M.M. (Anggota Komisi A-Fraksi Nasdem).

B. PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat Kabupaten Demak;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Demak;
6. Ketua Paguyuban Camat se-Kabupaten Demak;

IV. PENDAHULUAN :

C. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomo 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026.

D. TUJUAN :

13. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025.
14. Sebagai bahan laporan rapat konsultasi Pimpinan DPRD.

V. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

A. Inspektorat Kabupaten Demak;

Pada Aspek Pelayanan Umum, Inspektorat berhasil mencatatkan nilai Indeks Integritas sebesar 79,46 dari target yang ditetapkan sebesar 78, atau mencapai 101,87%. Capaian yang melampaui target ini merupakan indikator bahwa kualitas pelayanan pengawasan dan konsultasi yang diberikan telah memenuhi.

Dari sisi penguatan sistem kontrol organisasi, Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terealisasi sebesar 2,988 dari target 3,07, atau sebesar 97,32%. terdapat beberapa parameter yang belum dapat terukur, yaitu Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Level Kapabilitas APIP. terdapat beberapa faktor krusial yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain Tindak Lanjut di Tingkat Perangkat Daerah yang Belum optimalnya komitmen Perangkat Daerah serta Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, baik dari BPK RI, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.

Rekomendasi atau catatan strategis yang bisa dilakukan:

1. Memperkuat implementasi SPIP di seluruh Perangkat Daerah
2. Lengkapi data untuk evaluasi kinerja sasaran strategis dan kapabilitas APIP

Kesimpulan :

Nilai SAKIP yang di keluarkan oleh inspektorat terhadap OPD ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, nilai bagus tapi realisasi kinerja OPD sangat tidak baik dan masih banyak kritikan dari masyarakat.

B. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Indikator Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan terealisasi sebesar 100% , Presentase Instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan oleh seluruh instansi sebesar (100.05%) dari yang ditargetkan. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Dindukcapil mencapt target sebesar (100%),

Sementara itu, Realisasi Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik sebanyak (98,44%) lebih tinggi dari provinsi (98,77% berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran), namun sedikit di bawah target. Hal ini menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan percepatan perekaman melalui berbagai inovasi layanan jemput bola guna memastikan seluruh penduduk wajib KTP mendapatkan hak identitasnya secara menyeluruh

Rekomendasi :

1. Lakukan jemput bola dan layanan keliling untuk menjangkau penduduk yang belum memiliki KTP elektronik.
2. Perkuat pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan.
3. Pertahankan dan tingkatkan inovasi pelayanan adminduk

C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;

Capaian Aspek Pelayanan Umum, Indikator Kasus konflik antar/intra umat beragama, indikator Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik dan indikator Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa mencapai 100%.

Rekomendasi :

1. Pertahankan kerukunan dan toleransi umat beragama
2. Tingkatkan pendidikan politik yang berkualitas.
3. Perkuat wawasan kebangsaan dan bela negara.
4. Lengkapi data Capaian Indikator Kesatuan Bangsa untuk evaluasi.

D. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Demak

Pada aspek Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,63 dari target 90,60, atau mencapai 100,03%. Capaian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah memenuhi ekspektasi, Nilai SAKIP terealisasi sebesar 83,35 dari target 83,30, atau sebesar 100,06%. Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang terealisasi penuh sebesar 100%. Indeks Profesionalitas ASN yang mencapai angka 83,17 dari target 83,10 (100,08%). Persentase Jabatan ASN yang Sesuai dengan Kompetensinya yang telah mencapai target 100%,

Selain itu, Rasio Pelanggaran Disiplin ASN yang tertangani dengan persentase capaian target sebesar 114,29%.

Sedangkan untuk Indeks Kepuasan ASN terhadap Layanan Kepegawaian mencatatkan nilai 90,63 dari target 90,60 (100,03%), meskipun secara angka menunjukkan keberhasilan, perlu bagi BKPSDM untuk terus melakukan pembenahan sistem informasi kepegawaian dan integrasi data secara menyeluruh. Penguatan basis data ini sangat krusial guna mendukung proses pengambilan kebijakan daerah yang berbasis data (*data-driven policy*), Indeks reformasi Birokrasi tidak terukur.

Rekomendasi :

1. Segera mengisi kekosongan jabatan agar tidak terjadi stagnasi dan merugikan anggaran di tahun berikutnya.
2. Tingkatkan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan
3. Lengkapi data pendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) reformasi birokrasi.

Kesimpulan :

Banyaknya Plt bertahun tahun tidak terselesaikan, bahkan hari ini 24 PLT ini sangat memperburuk kinerja instansi, maka perlu di buatnya PANSUS terkait ruwetnya PLT di OPD & INSTASI PEMERINTAHAN, Segera mengganti Plt yang sekarang masih menjabat di Kantor Lingkungan Pemerintahan Demak. Berikut data Plt Se-kabupaten Demak

- Asisten 1
- Sekwan
- Ka Dinpermades
- Ka Satpol PP
- Ka Dinsos
- Ka Dinkominfo
- Ka Dindukcapil
- Ka Dinpora
- Ka Din PUPR
- Kabag Hukum Setda
- Kabag Adpemb Setda
- Kabag Kesra Setda
- Kabag PBJ Setda
- Kabag Prokompimp Setda
- Kabag Pemerintahan Setda
- Ka Dinperkim Kabag Organisasi Setda
- Camat Demak
- Camat Wonosalam
- Camat Dempet
- Camat Mijen
- Camat Wedung
- Camat Mranggen
- Camat Kebonagung

E. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Demak;

Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 93,018 dari target 93,00 atau sebesar 100,02%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi, Indikator Persentase Desa Mandiri terealisasi sebesar 122,41 dari target 65,22 atau mencapai sebesar 187,69 %.

Sementara itu, indikator Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan capaian yaitu sebesar 2,02 dari target 2,03 atau mencapai 100,50%. Angka ini mencerminkan peningkatan efektivitas program pengendalian penduduk.

Prevalensi Peserta KB Aktif berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 78,83% dari target 73,77%, atau sebesar 106,86%. menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

Rekomendasi atau catatan strategis yang bisa dilakukan:

1. Identifikasi faktor keberhasilan percepatan status desa mandiri untuk direplikasi.
2. Pertahankan program KB yang efektif.
3. Tingkatkan akses dan kualitas pelayanan KB.

Kesimpulan :

1. Kinerja Dinpermades yg sangat tidak efektif, banyak problem dan aduan masyarakat di beberapa desa yang tidak terselesaikan oleh Dinpermades dan adanya banyak indikasi kecurangan yg di temukan dalam proses Pilperades. Maka komisi A merekomendasikan di bentuk PANSUS.

F. Paguyuban Camat se-Kabupaten Demak

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Demak secara umum masih berada di bawah target yang ditentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, hambatan utama dalam pencapaian nilai SAKIP ini disebabkan oleh masih adanya perangkapan jabatan pada posisi Camat maupun pejabat struktural lainnya di lingkungan kecamatan. Kondisi perangkapan jabatan ini bertaruh pada beban kerja yang tidak proporsional, sehingga mengganggu ritme serta efektifitas dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi program kerja. Hal ini menjadi catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten untuk segera melakukan optimalisasi pengisian jabatan guna menjamin tata kelola birokrasi di tingkat kecamatan berjalan lebih akseleratif dan akuntabel di masa mendatang

Rekomendasi atau catatan strategis yang bisa dilakukan:

1. Pembinaan dan Pendampingan peningkatan kualitas SAKIP di kecamatan.
2. Jadikan percontohan beberapa kecamatan yang nilai IKM melampaui target dengan baik

VI. PENUTUP :

Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD sepakat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025.


Rapatditutup pada pukul 15.00 WIB.

Demak, 18 Maret 2026

KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)

DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua



MUADHOM, S. Pd.I

Sekretaris



FATKHAN, S.H



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

LAPORAN RAPAT

KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)

**BERSAMA BPKPAD, DINDAGKOP, DINPERTAN, DINPMPTSP, DINLUTKAN,
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA, DAN BUMD KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 171.53/1/KOM.B/DPRD/2026

Tahun Sidang	: 2026
Masa Persidangan	: I (Kesatu)
Jenis Rapat	: Rapat Komisi
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Senin s.d. Kamis, 6 - 16 April 2025
Tempat	: Ruang Rapat Komisi B
Acara	: Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025
Ketua Rapat	: Tatiek Soelistijani, S.H. (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Demak – Fraksi PDI-P)
Sekretaris Rapat	: Muh. Safi'i, S.Pd.I. (Sekretaris Komisi B - Fraksi PKB)
Hadir	: C. DPRD KABUPATEN DEMAK 10 orang anggota hadir dari jumlah 12 orang anggota dengan rincian:

7. Tatiek Soelistijani, S.H. (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Demak – Fraksi PDI-P)
8. Muh. Safi'i, S.Pd.I. (Sekretaris Komisi B - Fraksi PKB)
9. H. Isa Ansori, S.T. (Anggota Komisi B - Fraksi PKB)
10. Suhartono, S.T. (Anggota Komisi B - Fraksi PDI-P)
11. Ahmad Riyanto (Anggota Komisi B - Fraksi PDI-P)
12. Ristiko Arda Nari (Anggota Komisi B - Fraksi Golkar)
13. H. Martono (Anggota Komisi B - Fraksi Nasdem)
14. H. Moh. Syafii, S.E., M.M. (Anggota Komisi B - Fraksi Nasdem)
15. Rizky Erfandy Kurniawan, S.E., M.M. (Anggota Komisi B - Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera)
16. Subari (Anggota Komisi B - Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera)

B. PERANGKAT DAERAH

1. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak;
3. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak; 6. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Demak; 7. BUMD Kabupaten Demak
VII. PENDAHULUAN	:
E. DASAR	:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomo 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026.
F. TUJUAN	:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025; 2. Sebagai bahan laporan Pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD.
VIII. KESIMPULAN/KEPUTUSAN	:
AN	
A. BPKPAD Kabupaten Demak :	
	Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada BPKPAD Kabupaten Demak yaitu Opini BPK, Derajat Otonomi Fiskal, Persentase tata Kelola keuangan pemerintah daerah

sesuai kaidah perundangan, dan Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik sudah tercapai.

Untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah hanya tercapai sebanyak 74,054 yang seharusnya ditargetkan 82,6 sehingga gagal tercapai dikarenakan Indeks Pengalokasian belanja dalam APBD terdiri dari pegawai, infrastruktur, dan SPM mengalami penurunan. Untuk pegawai dan infrastruktur skor 0 karena tidak sesuai batas *mandatory spending*. Sedangkan Indeks SPM 0,83 karena tahun 2025 penilaiannya lebih rinci dengan menyandingkan antara pagu dan pengalokasiannya.

Kesimpulan :

Untuk memperbaiki kinerja ke depan, Pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan **restrukturisasi postur APBD** agar sesuai dengan batasan *mandatory spending* dan segera melengkapi dokumen administratif penjabaran anggaran guna menjaga akuntabilitas publik.

B. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dindagkop UKM Kabupaten Demak yaitu Persentase UMKM yang naik skala usaha, Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas, Persentase Peningkatan Omset UKM, Persentase harga Kebutuhan pokok yang terkendali, dan Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan sudah tercapai. Ada permasalahan yang perlu di evaluasi dan dicarikan alternatif. Permasalahan yang dihadapi di antaranya :

1. Berkurangnya pedagang di kios dan los pasar karena mulai banyaknya persaingan melalui media online
2. Banyaknya pedagang yang tutup tapi masih memegang kontrak sewa yang sulit untuk diaktifkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Adanya kenaikan harga Kebutuhan pokok di masyarakat karena banyaknya bahan pokok yang tidak tersedia di pasar
4. Masih kurangnya pengetahuan UMKM tentang Permodalan, Pemasaran, dan branding suatu produk;
5. Kurangnya minat masyarakat terhadap produk-produk UMKM
6. Belum adanya data rinci kepastian data-data penarikan retribusi by name per by kios dan los.
7. Ada pihak luar yang turut serta menarik biaya retribusi di luar pihak dinas
8. Agar Pasar Krempyeng bisa di fasilitasi untuk relokasi ke lingkungan bekas terminal Lama Bintoro

Rekomendasi atau catatan strategis yang bisa dilakukan:

- a. Segera membentuk Tim Pengawas untuk mengawasi kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Lingkungan Masyarakat
- b. Segera melakukan Monitoring dan Koordinasi tentang kenaikan bahan Kebutuhan pokok di Pasar
- c. Segera melaksanakan penataan ulang pedagang yang masih berlokasi di luar pasar
- d. Harus adanya *Sweeping* terkait pihak luar yang menarik biaya retribusi

Kesimpulan :

Meskipun indikator kinerja utama secara administratif telah tercapai, terdapat **kesenjangan (gap) antara data makro dan realitas lapangan** yang berpotensi menghambat keberlanjutan ekonomi daerah. Permasalahan utama berakar pada tiga aspek: **Digitalisasi, Regulasi, dan Tata Kelola.**

1. **Modernisasi Pasar Tradisional:** Adaptasi terhadap teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pasar harus bertransformasi menjadi ekosistem *omnichannel* (fisik dan digital) untuk melawan arus belanja online. Masalah sengketa kontrak kios memerlukan **ketegasan regulasi** agar aset daerah tetap produktif.
2. **Penguatan Rantai Pasok & Edukasi UMKM:** Kenaikan harga pokok seringkali disebabkan oleh masalah distribusi, bukan sekadar kelangkaan. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM melalui **pendampingan intensif (inkubasi)** agar produk lokal mampu bersaing secara kualitas dan branding, sehingga menarik minat beli masyarakat.
3. **Transparansi dan Integritas Sistem:** Kebocoran retribusi akibat pihak luar dan data yang tidak akurat hanya bisa diselesaikan dengan **digitalisasi sistem retribusi (E-Retribusi)**. Hal ini akan memastikan pendapatan daerah lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
4. **Optimalisasi Aset Daerah:** Rencana relokasi Pasar Krempeyeng ke bekas Terminal Bintoro merupakan solusi cerdas untuk penataan kota, asalkan didukung dengan penyediaan fasilitas yang layak dan manajemen transisi yang baik bagi pedagang.

C. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

Ada satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang Tidak tercapai yaitu Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan nilai -9.5 yang seharusnya dengan target 4.19 pada subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian disebabkan karena:

1. Kondisi iklim dan cuaca yang ekstrem yang mengakibatkan pola hujan yang tidak menentu.
2. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya hama tikus.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana pertanian.
4. Turunnya tingkat kesuburan tanah.
5. Penggunaan alsintan pada beberapa komoditas menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi karena tidak memungkinkan pemilahan hasil produksi berdasarkan tingkat kematangan (studi kasus kacang hijau).
6. Rendahnya kesadaran biosekuriti di tingkat peternak sehingga meningkatkan risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular serta frekuensi kejadian penyakit menjadi lebih tinggi yang berakibat pada penurunan produktivitas ternak.
7. Masih terjadinya pemotongan sapi/kerbau betina produktif.
8. Berkurangnya lahan kubangan dan areal penggembalaan sapi/kerbau sehingga mempengaruhi sistem pemeliharaan ternak secara optimal.
9. Peternak masih mengalami kesulitan dalam penyediaan pakan akibat ketergantungan pada bahan baku impor yang berdampak pada ketersediaan dan harga pakan.
10. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh ternak terganggu dan stress, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas.
11. Tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan harga jual yang memadai, sehingga menurunkan tingkat keuntungan peternak.
12. Keterbatasan modal dan sumber daya, baik dari aspek finansial maupun kapasitas peternak, yang mempengaruhi pengembangan usaha peternakan.

Rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu :

- a. Perlu adanya pendampingan dan alternatif solusi dari Pemerintah Kabupaten Demak terhadap para petani dan warga korban yang terdampak dari banjir jebolnya tanggul sungai di Kecamatan Kebonagung yang mengakibatkan sekitar 662 ha luas sawah di Kecamatan Guntur dan Kecamatan Karangtengah mengalami gagal panen
- b. Antisipasi alih fungsi lahan produktif dengan mematuhi pembagian tata ruang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait;
- c. Mengembangkan fasilitasi kemitraan dan sistem pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- d. Mengembangkan penerapan teknologi dan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen
- e. Mengembangkan usaha pembibitan ternak dengan memberikan bantuan ternak sapi betina bunting pada kelompok tani;
- f. Peningkatan kompetensi petani milenial melalui pelatihan.
- g. Atasi penanganan rawan pangan kronis setelah bencana yang terjadi di Kabupaten Demak terutama bencana Banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai di Sungai Kalituntang di Kecamatan Kebonagung
- h. Memperbaiki jaringan distribusi dengan memotong rantai pasokan melalui pemberdayaan gapoktan
- i. Membuat Pelatihan pengolahan pangan alternatif berbasis sumber daya lokal
- j. Memperhatikan kebutuhan petani, serta membantu dalam hal pemilihan bibit unggul, pengadaan pupuk agar lebih produktif dan inovatif serta mengontrol harga jual disaat panen raya supaya harga bisa stabil.

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada subkategori pertanian dan peternakan mengalami **penurunan signifikan (kontraksi)** sebesar **-9,5%**, yang menunjukkan deviasi yang sangat jauh dari target pertumbuhan positif **4,19%**. Kegagalan pencapaian target ini tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan akumulasi dari tiga dimensi permasalahan utama:

1. **Anomali Alam dan Degradasi Lingkungan:** Perubahan iklim ekstrem dan penurunan kesuburan tanah menjadi faktor penghambat fundamental yang berada di luar kendali teknis petani, namun dampaknya gagal dimitigasi oleh sistem peringatan dini yang ada.
2. **Ketidaksiapan Infrastruktur dan Teknologi:** Adanya kesenjangan antara ketersediaan sarana prasarana dengan kebutuhan di lapangan, serta penggunaan mekanisasi (Alsintan) yang belum presisi, justru menimbulkan kerugian hasil (*loss*) pada komoditas tertentu seperti kacang hijau.

3. **Kelemahan Tata Kelola dan Ekonomi Sektor:** Rendahnya kesadaran biosekuriti, praktik pemotongan ternak produktif yang masih marak, serta ketergantungan pada input produksi impor (pakan) menyebabkan biaya produksi membengkak. Hal ini diperburuk dengan rendahnya harga jual di tingkat produsen, yang secara langsung memukul profitabilitas dan motivasi pelaku usaha agraris.

D. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak :

Terdapat 2 indikator yaitu Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA dengan realisasi hanya 2215 yang seharusnya ditargetkan 2550 dengan persentase hanya mencapai 86,86 % dan Persentase Peningkatan Investasi yang tidak tercapai dengan nilai hanya 0,08 dari target yang seharusnya dapat mencapai 0,24 dengan persentase 33,33 % dengan penyebab diantara lain:

1. Masih terdapat regulasi yang tumpang tindih yang berpotensi menghambat proses perizinan dan realisasi investasi;
2. Tingkat Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih belum disiplin atau belum memahami kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu dan benar sehingga berdampak pada kelengkapan dan akurasi data investasi;
3. Pelaku usaha bingung dalam Penyampaian LKPM.

Rekomendasi atau catatan strategis yang bisa dilakukan:

1. Optimalkan peran pelayanan perizinan untuk mempercepat proses perizinan dan pengendalian penanaman modal;
2. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kewajiban pelaporan LKPM melalui OSS RBA, melakukan pendampingan dan pengingat berkala kepada pelaku usaha;
3. Sosialisasi/bimtek LKPM bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat LKPM.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, kinerja investasi menunjukkan tren yang **kurang optimal**, terutama pada aspek pertumbuhan nilai investasi. Meskipun realisasi jumlah proyek mampu mencapai angka **86,86%**, hal ini tidak berbanding lurus dengan nilai peningkatan investasi yang hanya menyentuh **33,33%** dari target yang ditetapkan.

Terdapat tiga kendala utama yang saling berkaitan:

1. **Hambatan Struktural:** Adanya regulasi yang tumpang tindih menciptakan ketidakpastian hukum, yang secara langsung memperlambat proses eksekusi investasi di lapangan.
2. **Lemahnya Akurasi Data:** Rendahnya capaian angka investasi kemungkinan besar dipengaruhi oleh "*under-reporting*" (pelaporan yang lebih rendah dari kenyataan). Banyak pelaku usaha yang belum disiplin atau tidak memahami cara mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. **Kendala Teknis Operasional:** Kebingungan pelaku usaha dalam menggunakan sistem pelaporan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait masih perlu ditingkatkan.

E. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak :

Sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 91,66 dari target 91,65 atau sebesar 100,01%.

Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar 79,41 dari target 79,30 atau mencapai 100,14%.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) subkategori perikanan tidak tercapai, yaitu sebesar 0,74% dari target 5,67% (13,05%). Pertumbuhan ekonomi pada subkategori perikanan masih menunjukkan tren positif (mengalami kenaikan), namun laju pertumbuhannya melambat pada tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi perikanan tangkap akibat cuaca yang kurang mendukung, seperti gelombang tinggi dan angin kencang. Selain itu, pendangkalan muara di kawasan Morodemak menyebabkan keterbatasan akses kapal besar ke TPI, sehingga sebagian hasil tangkapan didaratkan di daerah lain. Sementara itu, produksi perikanan budidaya relatif stabil.

Indikator peningkatan omset UKM pengolahan hasil perikanan menunjukkan capaian yang baik, yaitu sebesar 8,9% dari target 8,8% atau mencapai 101,14%.

Rekomendasi yang bisa dilakukan:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan meningkatkan ketrampilan nelayan dengan memfasilitasi percontohan untuk dilaksanakan pelatihan.

Kesimpulan :

Berdasarkan data capaian kinerja yang Anda sampaikan, berikut adalah rumusan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis:

Kesimpulan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan tren yang **sangat positif pada aspek administratif dan pelayanan**, namun menghadapi **tantangan sektoral pada aspek produksi lapangan**. Berikut adalah poin-poin utamanya:

1. **Efektivitas Pelayanan dan Tata Kelola:** Dinas berhasil melampaui target strategis organisasi, yang dibuktikan dengan nilai **SAKIP (79,41)** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat (91,66)** yang mencapai di atas 100% dari target. Hal ini menunjukkan tata kelola birokrasi dan kualitas pelayanan publik berada pada level yang sangat baik.
2. **Dinamika Ekonomi Perikanan:**
 - **Sektor Pengolahan:** Menunjukkan performa impresif dengan kenaikan omzet UKM yang mencapai **101,14%**, menandakan sektor hilir perikanan memiliki daya tahan dan pasar yang stabil.
 - **Sektor Produksi (LPE):** Menjadi catatan evaluasi karena hanya mencapai **13,05%** dari target yang ditetapkan. Meskipun tetap tumbuh positif, laju pertumbuhannya melambat secara signifikan.
3. **Faktor Penghambat Utama:** Ketidaktercapaian target LPE bukan disebabkan oleh kinerja manajerial, melainkan faktor eksternal dan infrastruktur, yaitu:
 - **Faktor Alam:** Cuaca ekstrem (gelombang tinggi dan angin kencang) yang menghambat aktivitas penangkapan.
 - **Kendala Infrastruktur:** Pendangkalan muara di **Morodemak** yang memaksa kapal besar mendaratkan hasil tangkapan di luar daerah, sehingga terjadi "kebocoran" potensi ekonomi daerah.

4. **Sektor Unggulan Alternatif:** Perikanan budidaya menunjukkan stabilitas yang baik, sehingga menjadi penyangga (buffer) saat sektor perikanan tangkap sedang mengalami kendala teknis dan alam.

F. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak

Capaian pada indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki target nilai sebesar 62 dengan mencapai realisasi 64,44 dan masih berjalan,

Rekomendasi yang bisa dilakukan :

Melaksanakan Pengawasan terhadap ketersediaan barang dan Harga kebutuhan pokok yang beredar di Masyarakat pada saat krisis perekonomian.

Kesimpulan :

Secara keseluruhan, pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**. Hal ini didasarkan pada poin-poin berikut:

1. **Pelampauan Target:** Realisasi indikator sebesar **64,44** telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar **62**. Secara proporsional, tingkat ketercapaian kinerja (prognosis) saat ini berada di angka **103,94%**.
2. **Efektivitas Program:** Keberhasilan melampaui target sementara program masih dalam status "**berjalan**" mengindikasikan adanya akselerasi pelaksanaan kegiatan dan efektivitas dalam manajemen urusan pembangunan.
3. **Potensi Optimalisasi:** Mengingat periode pelaksanaan yang masih berlangsung, terdapat peluang besar

G. BUMD Kabupaten Demak

BUMD telah mencapai target 100% Dividen yang ditetapkan pada target APBD Tahun Anggaran 2025.

Terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Peran Pengawasan BUMD yang belum optimal
2. Tata Kelola BUMD yang masih belum sesuai harapan

Rekomendasi yang bisa dilakukan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan menjaga kualitas air, untuk tarif agar diperhatikan karena banyaknya keluhan dari Masyarakat dari tahun ketahun tidak berubah.
2. PT. Anwusa harus memantau ketersediaan kebutuhan gas LPG yang beredar di Masyarakat

I. PENUTUP

Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak sepakat atau menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025

Demikian laporan rapat Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

Demak, 18 April 2026

KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)

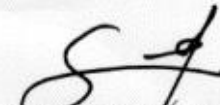
DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua,



TATIEK SOELISTIJANI, S.H.

Sekretaris,



MUH. SAFI, S.Pd.I.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**LAPORAN RAPAT
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)**

**DINPUTARU, DINPERKIM, DINHUB, DAN BAGIAN BPJ SETDA KABUPATEN
DEMAK**

Nomor : 171.53/1/KOM.C/DPRD/2026

Tahun Sidang	: 2026
Masa Persidangan	: I (Kesatu)
Rapat Ke-	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Komisi
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Kamis, 9 April 2025
Waktu	: 13.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi C
Acara	: Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025
Ketua Rapat	: Ulin Nuha, S.Pd.I. (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Demak – Fraksi PKB)
Sekretaris Rapat	: H.Muntohar,SH (Sekretariat Komisi C DPRD Kabupaten Demak – Fraksi Gerindra)
Hadir	: D. DPRD KABUPATEN DEMAK 7 orang hadir dari 12 orang pimpinan dan anggota Komisi C dengan rincian: 7. Ulin Nuha, S.Pd.I (Ketua Komisi C Fraksi PKB) 8. H.Sonhaji,SH (Fraksi PDI Perjuangan) 9. Drs. H. Syafii Afandi,S.Pd (Fraksi Fraksi PKB) 10.Heny Setiyowati, S.E (Fraksi Fraksi PKB) 11.H. Busro, S.Pd (Fraksi PDI Perjuangan) 12.Muhamad Mualana Rafli (Fraksi PDI Perjuangan) 13.Ahmad Mansur,S.E (Fraksi Gerindra) 14.Suhartono (Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera)

B. PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
2. Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kabupaten Demak;
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Demak;

IX. PENDAHULUAN :

G. DASAR :

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomo 42);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026.

H. TUJUAN :

1. Membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan laporan Pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD.

X. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

H. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;

Indikator kinerja daerah kabupaten demak tahun 2025 pada LKPJ yang belum tercapai Persentase Drainase dalam Kondisi baik Realisasi kinerja 87,846 dengan prosentase 92,74%. faktor penghambat meliputi :

1. Kondisi drainase masih dibawah target
2. Kendala Lahan: Sulitnya pembebasan lahan untuk pembuatan saluran baru atau pelebaran drainase karena pemukiman yang terlalu padat.
3. Anggaran Terbatas: Alokasi dana yang tidak mencukupi untuk normalisasi seluruh titik genangan atau keterlambatan pencairan anggaran.
4. Kesadaran Masyarakat: Kebiasaan membuang sampah ke saluran air dan adanya bangunan liar di atas drainase yang menyulitkan pembersihan.
5. Sedimentasi Tinggi: Cepatnya pendangkalan saluran akibat endapan lumpur dan sampah yang tidak sebanding dengan frekuensi pemeliharaan rutin.
6. Masalah Teknis/Topografi: Kemiringan lahan yang sangat landai atau elevasi saluran yang lebih rendah dari permukaan air laut/sungai (backwater), sehingga air sulit mengalir.
7. Kurangnya Koordinasi: Belum sinkronnya pembangunan antara jalan (UPT pusat/provinsi) dengan drainase lokal, sehingga sistem pembuangan air terputus.

Rekomendasi atau catatan strategis yang dilakukan:

1. Tingkatkan program rehabilitasi dan pemeliharaan drainase secara berkala.
2. Penyusunan Masterplan Drainase melakukan review atau penyusunan rencana induk (masterplan) sistem drainase yang komprehensif agar pembangunan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
3. Koordinasi Lintas Sektor (OPD) meningkatkan sinkronisasi antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait (termasuk pemerintah pusat/provinsi untuk jalan nasional/provinsi) agar penanganan tidak terputus.

4. Skala Prioritas Anggaran memfokuskan alokasi APBD pada wilayah langganan banjir atau titik genangan tertinggi yang berdampak pada mobilitas ekonomi masyarakat;

I. Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kabupaten Demak;

Terdapat 2 (dua) Capaian Indikator Kinerja Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kabupaten Demak yaitu Persentase Kawasan Pemukiman Layak Realisasi kinerja 99,52 dengan prosentase 100,06%. dan Persentase Penurunan Kawasan Kumuh Realisasi 57,51 dengan prosentase 111,07%.

Rekomendasi yang bisa dilakukan berupa Percepatan penanganan kawasan kumuh yang tersisa

J. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Persentase Cakupan Aksesibilitas Antar wilayah Realisasi 99,14% dengan prosentase 99,14%.

Rekomendasi bisa dilakukan:

1. Terjadi Sengketa Tapal Batas Ketidakjelasan garis batas darat maupun laut yang memicu konflik antar wilayah
2. Ketimpangan Infrastruktur Kurangnya pembangunan fasilitas publik, jalan, dan aksesibilitas dibandingkan wilayah perkotaan.

K. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Demak

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PBJ adalah belum optimalnya layanan dan administrasi pengadaan barang milik daerah, harga pengadaan barang/jasa melebihi standar harga satuan (SHS). Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

Evaluasi kebijakan system pengadaan barang dan jasa secara terpusat, Selama terdapat kebijakan tersebut pengadaan barang dan jasa sering bermasalah dan sering terjadi keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.

L. PENUTUP

Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak sepakat / menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025. Demikian laporan rapat Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

Rapat ditutup Pukul 17.00 WIB

DEMAK, 19 APRIL 2025
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua,



ULIN NUHA, S.Pd.I.

Sekretaris,



H. MUNTOHAR, S.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

LAPORAN RAPAT KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)	
BERSAMA DINDIKBUD, DINKES, DINSOSP2PA, DINNAKERIND, DINPERPUSAR, DINPERMADESP2KB	
Nomor : 171.53 / 1 / KOM.D / DPRD / 2026	
Tahun Sidang	: 2026
Masa Persidangan	: I (Kesatu)
Rapat Ke-	: 1
Jenis Kegiatan	: Rapat Komisi
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Jum'at, tanggal 10 April 2026
Waktu	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi D
Acara	: Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025
Ketua Rapat	: H. Mu'thi Kholil, S.H.. (Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Demak – Fraksi Gerindra)
Sekretaris Rapat	: H. Faozan, S.H. (Sekretaris Komisi D - Fraksi PDI Perjuangan)
Hadir	: A. ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK 4 orang anggota hadir dari jumlah 12 orang anggota dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Mu'thi Kholil, S.H (Ketua Komisi D Fraksi Gerindra) 2. Hermin Widyawati, S.Pd (Anggota Komisi D Fraksi Golkar) 3. H. Danang Saputro, S.H. (Anggota Komisi D Fraksi Gerindra) 4. Eko Setio Budi Utomo, S.Pd. (Anggota Komisi D Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera)

		<p>B. PERANGKAT DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak
XI. PENDAHULUAN	:	
I. DASAR	:	
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomo 42); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 15. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026;
J. TUJUAN	:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2025 2. Sebagai pertanggungjawaban Komisi D untuk Bahan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan
XII.KESIMPULAN/KEPUTUSAN	:	
		<p>i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak</p> <p>Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pada LKPJ yang belum tercapai yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pendidikan

Target di tahun 2025 sebesar 0,667, Realisasi 2025 sebesar 0,648 dengan prosentase 97,11. Atau tidak tercapai

2. Harapan Lama Sekolah

Target di tahun 2025 sebesar 14, Realisasi 2025 sebesar 13,37 dengan prosentase 95,5 Atau tidak tercapai

- HLS yang mencapai 13,37 tahun menunjukkan bahwa harapan pendidikan anak-anak di Demak baru mencapai tingkat SLTA/Diploma I, jenjang pendidikan tinggi masih terbatas bagi sebagian masyarakat karena faktor ekonomi, letak geografis yang sulit, atau keterbatasan infrastruktur pendukung.
- Disparitas Wilayah; Adanya perbedaan kualitas pendidikan yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan menghambat peningkatan HLS secara merata di seluruh Kabupaten Demak.
- Masalah Motivasi dan Relevansi; Kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa seringkali disebabkan oleh kurikulum yang dinilai kurang menarik, metode pengajaran yang tidak interaktif, serta materi pembelajaran yang dirasa tidak relevan dengan kebutuhan siswa.
- Masih Banyak Warga Demak yang belum melakukan pembaruan Riwayat Pendidikan di Kartu Keluarga, yang seharusnya sudah Sarjana Tetapi tercatat masih SMA/atau dibawahnya.

Rata-Rata kenaikan setiap tahun 0,01

3. Rata-rata Lama Sekolah

Target di tahun 2025 sebesar 8,34, Realisasi 2025 sebesar 8,29 dengan prosentase 99,4 Atau tidak tercapai

Faktor penghambatnya antara lain:

- Beban Historis Pendidikan; Angka RLS sangat dipengaruhi oleh penduduk usia dewasa (25 tahun ke atas) yang mencerminkan terbatasnya akses pendidikan di masa lalu.
- Prioritas Ekonomi Keluarga; Penduduk usia produktif di Kabupaten Demak cenderung lebih fokus pada bekerja untuk mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Rendahnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan; Capaian kinerja untuk penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 16,78%

Rata-Rata kenaikan setiap tahun 0,01

Rekomendasi

1. Indeks Pendidikan

- Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan
- Kurangi angka putus sekolah
- Mendorong masyarakat untuk bersekolah setinggi-tingginya

- Menyediakan beasiswa untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk dapat mengenyam Pendidikan setinggi-tingginya

2. Harapan Lama Sekolah

- Mendorong pencapaian HLS dan RLS sesuai target yang ditetapkan
- Tingkatkan partisipasi pendidikan tinggi
- program kejar paket
- Mendorong masyarakat untuk bersekolah setinggi-tingginya.
- Menyediakan beasiswa untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk dapat mengenyam Pendidikan setinggi-tingginya
- Melibatkan Camat, Kades/ Lurah, Ketua RT/ RW untuk mendorong warganya update data kependudukan
- Melibatkan Camat, Kades/ Lurah, Ketua RT/ RW untuk mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya untuk Kembali bersekolah

3. Rata-rata Lama Sekolah

- Program percepatan wajib belajar 12 tahun
- Penuntasan Wajar Dikdas.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terus memberikan BASIMDA dan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali berbasis data dari Dinsos P2P
- Pemerintah Daerah melibatkan struktur pemerintahan mulai dari Camat hingga RT guna identifikasi dan mendorong ATS untuk kembali sekolah
- Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kemenag terkait santri yang belum menempuh pendidikan formal/ non formal.

Permasalahan yang dihadapi :

- Banyaknya rangkap jabatan dan Pejabat Plt. di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak khususnya Kepala Sekolah

Rekomendasi / Tindak Lanjut :

- Definitifkan semua Kepala Sekolah di lingkungan Kab. Demak

Kesimpulan :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mengalami kegagalan dalam meningkatkan Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

ii. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Semua Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pada LKPJ sudah tercapai :

Permasalahan yang dihadapi :

1. Ketidaksiuaian antara laporan Dinas Kesehatan dan kondisi riil di lapangan merupakan permasalahan serius yang sering disorot, terutama dalam konteks validasi data kesehatan. Berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah beberapa poin terkait isu tersebut:
 - Pentingnya Ground-Check: Perlu dilakukan verifikasi lapangan (ground-check) untuk memastikan data riil, seperti dalam kasus penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), di mana pendamping lapangan mengetahui kondisi sebenarnya.
 - Risiko Data: Penyajian data yang tidak tepat dalam laporan dinas dapat menyebabkan kesalahan interpretasi, sehingga menghambat penanganan masalah kesehatan seperti stunting atau gizi buruk.
 - Tata Kelola Berbasis Data: KPK menekankan pentingnya perencanaan berbasis data riil agar program yang dijalankan dinas kesehatan tepat guna dan meminimalkan risiko korupsi.
2. Banyaknya rangkap jabatan dan Pejabat Plt. dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak khususnya Kepala Puskesmas
3. Pelayanan Dinas Kesehatan kepada masyarakat belum maksimal
4. BLUD di kabupaten Demak belum mampu menghasilkan PAD

Rekomendasi / Tindak Lanjut :

1. Definitifkan semua Kepala Puskesmas dilingkungan Kab. Demak

iii. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Semua Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pada LKPJ sudah tercapai :

Permasalahan yang dihadapi :

1. Program perlindungan dan jaminan sosial di Demak tahun 2025 adalah penonaktifan massal kepesertaan BPJS PBI
2. banjir besar yang berulang, diperparah oleh debit air tinggi, cuaca ekstrem, dan rob

Rekomendasi

1. Perlunya sinkronisasi data (DTSEN), koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta solusi pembiayaan alternatif agar perlindungan sosial tetap berjalan efektif
2. Koordinasi lintas pihak terkait penyaluran dana bantuan.

D. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pada LKPJ yang belum tercapai yaitu :

Data realisasi dan target program transmigrasi tahun 2025 tidak terukur (n/a).

Rekomendasi

1. Lengkapi data untuk evaluasi program transmigrasi
2. Menyimpan data calon transmigran yang tidak lolos seleksi untuk diikutkan kembali pada seleksi tahun berikutnya apabila kedepannya kuota yang tersedia cukup banyak

E. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pada LKPJ yang belum tercapai yaitu :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target 64,88 realisasi 09.42 tidak tercapai.
2. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) target 75,5 realisasi 58,89 tidak tercapai

Rekomendasi

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - Integrasi Literasi dalam Pendidikan Literasi harus menjadi budaya di sekolah,
 - Menggandeng komunitas literasi lokal
 - Mengajak tokoh publik atau influencer mempromosikan membaca Event literasi di ruang publik (car free day, taman kota)
2. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)
 - Kolaborasi sekolah dengan perpustakaan daerah guna membangun kebiasaan literasi sejak dini
 - pengisian formasi pustakawan pada perpustakaan dan perlu peningkatan kesejahteraan bagi pengelola perpustakaan desa

F. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

Semua Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pada LKPJ sudah tercapai :

Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya tata kelola pemerintah desa, baik administrasi desa, pengelola keuangan desa, maupun manajemen aparatur desa
2. Masih rendahnya status desa mandiri
3. Kurangnya kepesertaan KB

Rekomendasi

1. Mendorong pendekatan kolaboratif dan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal
2. Edukasi yang komprehensif mengenai manfaat jangka panjang KB membuat Pasangan Usia Subur (PUS) enggan ber-KB

XIII. PENUTUP

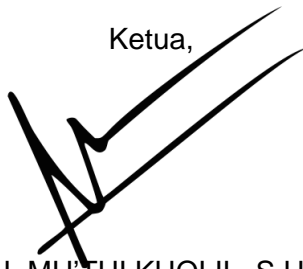
Pimpian dan Anggota Komisi D sepakat / menerima LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2025

Demikian Laporan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Komisi D (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) dalam rangka membahas LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2025

Demak, 19 APRIL 2026

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua,



H. MU'THI KHOLIL, S.H.

Sekretaris,



H. FAOZAN, S.H.

